



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SAMBAS

RENCANA STRATEGIS PERIODE 2025-2029



ALAMAT :

JALAN PEMBANGUNAN SAMBAS KODE POS. 79400
TELP. 0562-391004 FAX. 0562391003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Renstra Dinas P3PA2KB Kabupaten Sambas Tahun 2025- 2029 disusun sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang serta menjadi arah, acuan dan motivasi peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Dinas P3PA2KB Kabupaten Sambas.

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkannya RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Renstra Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 memuat uraian tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, target dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas P3PA2KB Kabupaten Sambas untuk Tahun 2025- 2029.

Mungkin dalam penyusunan Renstra ini masih banyak dijumpai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan atau apabila dilakukan review atas Renstra Dinas P3PA2KB Kabupaten Sambas dimasa mendatang, demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih.

Sambas, 31 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sambas,



SITI MUJIATI, SKM., M.Si
NIP. 198307232005022003

DAFTAR ISI

	Hlm.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	11
2.1 Gambaran Pelayanan	11
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.	11
2.1.2. Sumber Daya	25
2.1.3. Kinerja Pelayanan	38
2.1.4. Kelompok Sasaran.....	54
2.1.5. Mitra Pemberi Pelayanan.....	55
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	58
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	66
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	66
3.2 Strategi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 ..	67
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	75
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
BAB V PENUTUP	250

DAFTAR TABEL

Hlm.

Tabel II.1	Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan	25
Tabel II.2	Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pangkat, Golongan, Jabatan dan Pendidikan	26
Tabel II.3	Pagu Definitif Tahun Anggaran 2024	28
Tabel II.4	Komposisi Jumlah Perlengkapan Jumlah Barang Inventaris	36
Tabel II.5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama	39
Tabel II.6	Capaian Kinerja Sasaran dan Program	44
Tabel II.7	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi	49
Tabel II.8	Bentuk Kemitraan dengan Mitra	56
Tabel II.9.	Permasalahan Dan Isu Strategis	60
Tabel III.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran	66
Tabel III.2	Penahapan Renstra PD	69
Tabel III.3	Lokus Renstra PD	69
Tabel III.4	Arah Kebijakan Renstra PD	71
Tabel IV.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan	77
Tabel IV.2	Rencana Program dan Pendanaan	149
Tabel IV.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan	155
Tabel IV.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan	228
Tabel IV.5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	229
Tabel IV.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	230
Tabel IV.7	Defenisi Operasional dan Rumus Indikator	232

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD	2
Gambar I.2	Keterkaitan Renstra DP3AP2KB.....	3
Gambar II.1	Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas..	25

DAFTAR GRAFIK

	Hlm.
Grafik II.1 Tren Capaian IDG	40
Grafik II.2 Tren Capaian KLA Klaster I	41
Garfik II.3 Tren Capaian TFR	41
Garfik II.4 Tren Capaian mCPR.....	42
Grafik II.5 Tren Capaian Unmet Need	43
Grafik II.6 Tren Capaian ASFR.....	43
Grafik II.7 Tren Capaian MUKP	44
Grafik II.8 Tren Capaian iBangga	45
Grafik II.9 Tren Realisasi IKU untuk Indikator Positif	45
Grafik II.10 Tren Realisasi IKU untuk Indikator Negatif	46
Grafik II.11 Rata-rata Capaian IKU tahun 2021-2024	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagian substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Sehingga penyusunan renstra dimaksud dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

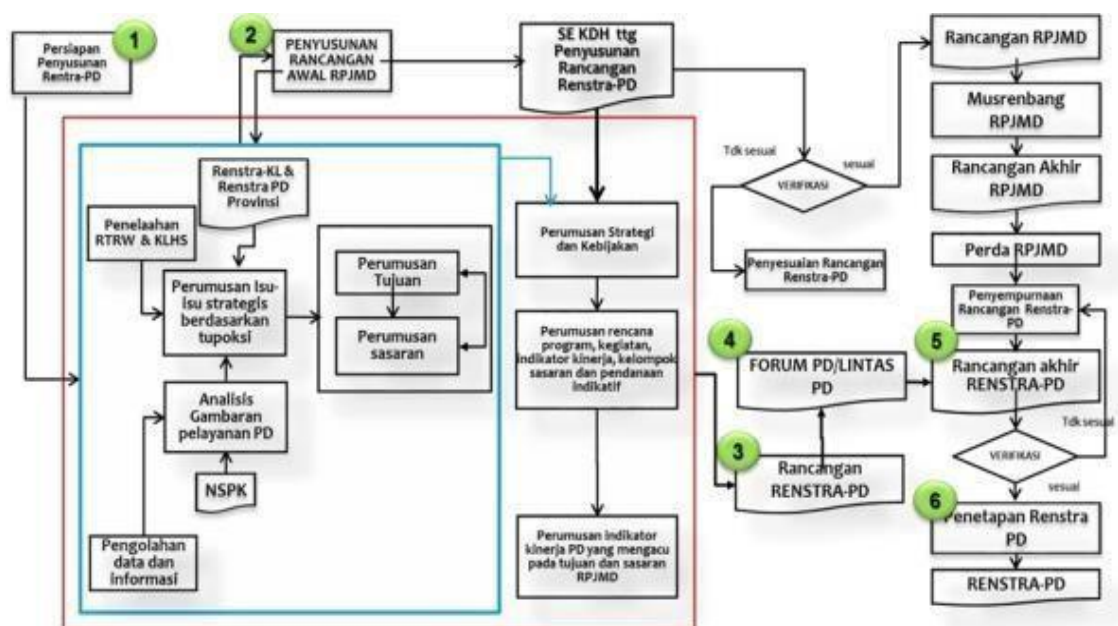
Penyelarasan dokumen renstra ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping menjabarkan visi, misi, dan program Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas, sekaligus juga pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8

(Delapan) Proyek Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan Rancangan Renstra tersebut selesai disusun.

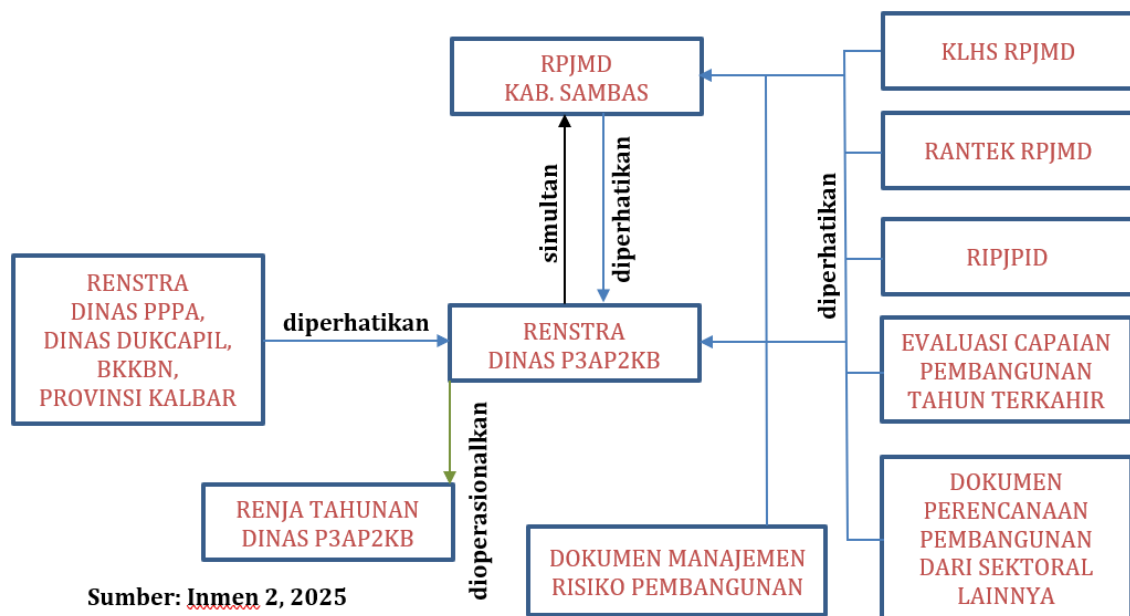
Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD. Dalam hal ini Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kabupaten Sambas disusun untuk digunakan pada masa perencanaan selama 5 tahun dengan mempertimbangkan RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan dokumen sektoral lainnya dengan pagu anggaran bersifat indikatif. Selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Renja PD). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1.2.
Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah



1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalog Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 10) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Person Especially Woman and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135);
- 14) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 21) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 30) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang

- Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 31) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 32) Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.26A/M.PPN/HK/05/2025 Tentang Kode Referensi Indikator Pembangunan;
 - 33) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 - 34) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4);
 - 35) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
 - 36) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
 - 37) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);

- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 83);
- 39) Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 48);
- 40) Peraturan Bupati Sambas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 94);
- 41) Keputusan Bupati Sambas Nomor/394/DP3AP2KB/2025 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas disusun dengan maksud peningkatan kinerja penyelenggaraan: bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan renstra ini yaitu:

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah: bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Menjadi acuan kerja bagi Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas serta pihak terkait dalam upaya pembangunan: bidang bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - 2.1.2. Sumber Daya
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas P3AP2KB merupakan unsur penunjang pemerintah daerah: bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas, ditetapkan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

A. Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. Berikut tugas dan fungsi pejabat struktural dan pejabat fungsional sesuai struktur organisasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas di bidang Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera Sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
2. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
3. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan;
4. penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan;
5. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan dinas;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,

b. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi,

administrasi kepegawaian, umum, reformasi birokrasi pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat;
2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan Keuangan dan Aset serta reformasi birokrasi;
3. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
4. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Dinas; pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta Keuangan dan Aset di lingkungan Dinas;
5. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan Aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
7. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
9. pelaksanaan kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris

membawahi 2 Sub Bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum kepegawaian dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi di lingkungan dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan; pengendalian dan pengawasan tugas di sub bagian umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan aset, pengendalian, dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja sub bagian keuangan dan aset;
 - b. pengumpulan, pengelolaan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas;
 - c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - d. pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan aset;
 - e. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan;
 - g. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
 - h. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran;
 - i. penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan dan aset;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
 - k. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender,

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

1. menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
2. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
3. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan penyediaan pelembagaan dan penguatan pengarusutamaan gender perlindungan perempuan;
6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
7. penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
8. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;

dan

9. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perlindungan, dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak;
2. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak;
3. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak;
4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak;
5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak;
6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak;

7. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak; dan
 8. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan, Pengendalian Penduduk dan data. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan, Pengendalian Penduduk dan data;
2. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan, Pengendalian Penduduk dan data;
3. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan, Pengendalian Penduduk dan data;
4. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah, dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
5. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) Pengendalian Penduduk di Kabupaten;
6. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta

organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten di Bidang Pengendalian Penduduk;

7. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB);
 8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk dan data, Sistem Informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk;
 9. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk dan data, Sistem Informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk; dan
 10. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Kesertaan berKeluarga Berencana, dan Ketahanan Keluarga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
2. pengkoordinasian di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
3. pelaksanaan penyelenggaraan Norma, Standar,

Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera;

4. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
 5. pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten;
 6. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan Ketahanan remaja;
 7. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga (Balita, Remaja, Lansia) dan rentan;
 8. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 9. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten;
 10. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan;
 11. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan;
 12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
 13. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB)

Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) sebagaimana dimaksud ini, sebagai tempat pengelolaan program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga). Balai Penyuluh Keluarga Berencana berjumlah 19 balai, yang terletak di setiap Kecamatan se-Kabupaten Sambas. Pengelolaan program KKBPK di Balai Penyuluh KB diselenggarakan oleh pejabat fungsional atau tenaga penyuluh KB meliputi penyuluhan, pelayanan,

penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang bertugas di Balai Penyuluh KB berstatus sebagai pegawai ASN BKKBN pusat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perijinan Kerja (PPPK). Program KKBPK merupakan bagian dari tugas dan fungsi yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun tugas dan fungsi pejabat fungsional atau penyuluh KB di kecamatan sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja pendataan di tingkat desa;
2. menyusun jadwal pendataan di tingkat desa;
3. membuat peta wilayah kerja di tingkat desa;
4. melakukan pendataan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
5. melakukan pendataan Kelompok Kegiatan (Poktan) di tingkat desa;
6. melakukan rekapitulasi hasil pendataan;
7. melakukan KIE perorangan;
8. melakukan pembentukan Poktan Bina Keluarga Balita (BKB);
9. melakukan pembentukan Poktan Bina Keluarga Remaja (BKR);
10. melakukan pembentukan Poktan Bina Keluarga Lansia (BKL);
11. melakukan pembentukan Poktan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
12. melakukan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
13. melaksanakan Pembentukan Poktan kegiatan sosial lainnya;
14. menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK di

- wilayah binaan;
15. menyusun rencana kerja bulanan Program KKBPK di wilayah binaan;
 16. menyusun rencana kerja tahunan Program KKBPK di wilayah binaan;
 17. melaksanakan pencatatan dan pelaporan Program KKBPK di tingkat desa;
 18. membuat peta pendataan IMP di tingkat Rukun Warga;
 19. melakukan pengolahan data hasil pendataan di tingkat desa/kelurahan;
 20. membentuk IMP/Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/sub PPKBD;
 21. melakukan sarasehan hasil pendataan di tingkat Rukun Tetangga;
 22. melakukan pembinaan peserta KB per 10 (sepuluh) peserta;
 23. melakukan koordinasi dengan tokoh formal di tingkat desa;
 24. melakukan koordinasi dengan tokoh informal di tingkat desa; dan
 25. membuat media KIE dalam bentuk sederhana;

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui

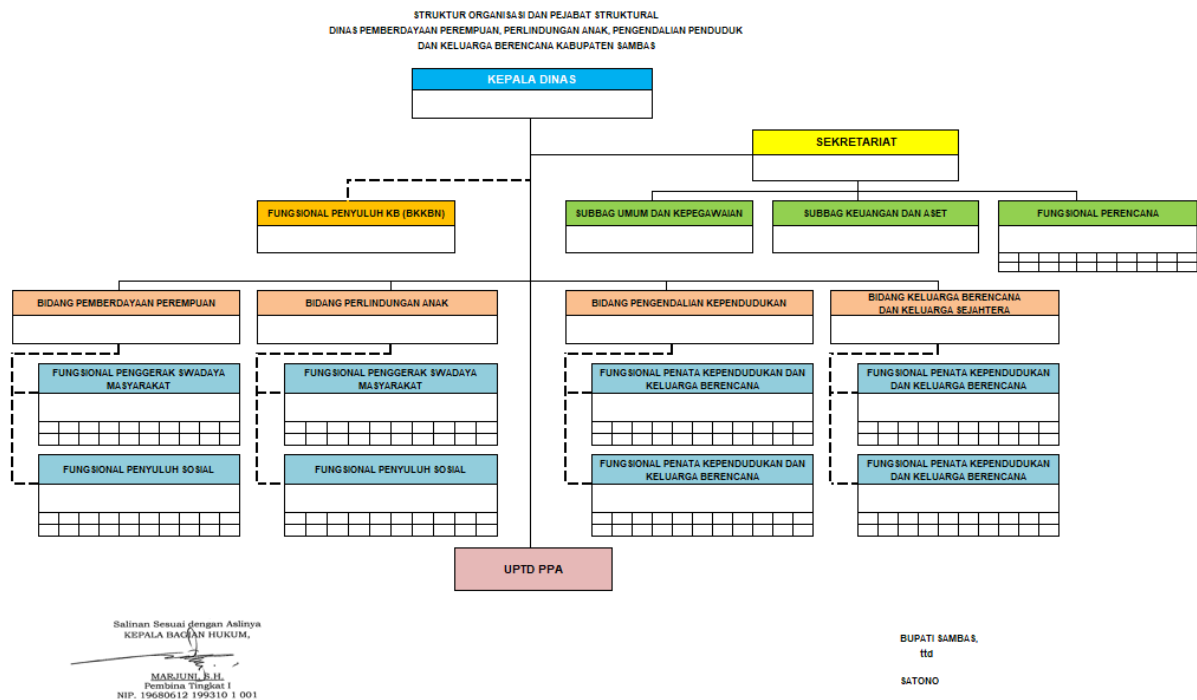
penyesuaian/*linpassing* berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan dan Aset
 - c. Kelompok Jabatan fungsional
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Perlindungan Anak membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi :
 - a. Kelompk Jabatan Fungsional
7. Balai Penyuluh Keluarga Berencana

Gambar II.1
Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas



2.1.2. Sumber Daya

Jumlah Pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas tahun 2025 terdiri dari PNS sebanyak 24 orang, Honorer sebanyak 8 orang dan Tenaga Kontrak 21 orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat di lihat pada tabel 1.1 dan 1.2 berikut:

Tabel II.1
Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

JABATAN	GOLONGAN				PENDIDIKAN						KET
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-
Fungsional	-	5	-	-	-	3	1		1	-	-
Kasubbag		2				2					
Administrasi	-	4	5	-	-	4	1	2	2	-	-

Tabel II.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
Berdasarkan Pangkat, Golongan, Jabatan dan Pendidikan

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	SITI MUJIATI, SKM., M.Si.	Plt. Kepala Dinas	S2
	NIP. 19830723 200502 2 003	Pembina Tingkat I/IV(b)	
2	FERI SATRIANSYAH, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	S2
	NIP. 19680202 199603 1 004	Pembina Tk.I/IV(b)	
3	DESI NURMAYANTI, S.Kom.	Kabid Pengendalian Penduduk	S1
	NIP. 19841211 201102 2 004	Penata TK.I/III(d)	
4	ARDIANSYAH, S.ST.,M.AP.	Kabid KB dan KS	S2
	NIP. 19760821 200701 1 016	Pembina/IV(a)	
5	WIDIASTUTI, Str.,Gz.	Kabid Perlindungan Anak	D4
	NIP.19740827 199703 2 002	Penata Tk.I/III(d)	
6	ROSNITA, SKM., M.Si.	Kabid Pemberdayaan Perempuan	S2
	NIP.19690703 198901 2 002	Pembina Tk.I/IV(a)	
7	AMSAR, SKM.	Penyuluh Sosial	S1
	NIP. 19680106 198812 1 003	Penata Tk.I/III(d)	
8	IRWANDA, SKM.	Perencana Ahli Muda	S1
	NIP. 19731002 199603 1 003	Penata Tk.I/III(d)	
9	NUR AZMA, SKM.	Penyuluh Sosial	S1
	NIIP. 19740919 199803 2 010	Penata Tk.I/III(d)	
10	SYARIFAH LESTARI, S.ST.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	D4
	NIIP. 19801130 200502 2 002	Penata Tk.I/III(d)	
11	PUTU XANTHINA DESSY UJIYANTHI,SE.	Kasubbag Keuangan dan Aset	S1
	NIP. 19871219 201101 2 015	Penata/III(c)	
12	BETI MARYATI, SIP.	Bendahara	S1
	NIP. 19740321 200312 2 005	Penata Muda Tk.I/III(b)	
13	NORMALA, S.Hum.	Analisis Jabatan	S1
	NIP. 19730326 200502 2 002	Penata Muda Tk.I/III(b)	
14	ERMA SUKMAWATI, ST.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	S1
	NIP. 19770929 200212 2 003	Penata Muda/III(a)	
15	DESY ISNAINI, A.Md.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	D3
	NIP. 19861222 201101 2 012	Penata Muda/III(a)	
16	BUDIMAN, S.Hum.	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & Anak	S1
	NIP. 19810110 201001 1 005	Penata Muda/III(a)	
17	MUHAMMAD ZULKARNAIN, S.Psi.	Analisis Perlindungan Perempuan	S1
	NIP. 19920314202012 1 011	Penata Muda/III(a)	
18	ANDHINI VRISA, S.Psi.	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S1

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
	NIP. 20011227 202504 2 005	Penata Muda/III(a)	
19	FAIZAL, S.M.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	S1
	NIP. 19900521 202504 1 001	Penata Muda/III(a)	
20	EGI SUMITRA, S.Kep.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	S1
	NIP. 19951007 202504 1 003	Penata Muda/III(a)	
21	DEDY MULYONO	Pengadministrasi Kependudukan	D3
	NIP. 19770314 200701 1 019	Pengatur Tk.I/II(d)	
22	SUPRIADI	Pengadministrasi Umum	SMA
	NIP. 19700427 201001 1 001	Pengatur Tk.I/II(d)	
23	DIAN EKA YANI	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	SMA
	NIP. 19771029 201001 2 003	Pengatur Tk.I/II(d)	
24	YANDI, A.Md.,A.B.	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	D3
	NIP. 19981021 202504 1 004	Pengatur/II(c)	

Sebesar 9,1% (diluar gaji) dari total pagu diperuntukan untuk program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Nilai pagu penunjang ini termasuk dalam kategori wajar untuk dinas yang melakukan pelayanan langsung. Adapun estimasi batas kewajaran berdasarkan praktik umum dan evaluasi KPK untuk dinas yang memberikan pelayanan langsung sebesar 5-15% (belanja pegawai, barang jasa dan operasi kantor). Pagu defenitif tahun anggaran 2024 berjumlah Rp.14.211.068.503,00 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Sebelas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah). Pagu yang tersedia termasuk belanja gaji PNS sebesar Rp.2.533.209.028,00 (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) dan belanja honorer sebesar Rp.410.838.464,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). Pagu dana terdistribusi dalam 10 program 27 kegiatan dan 69 sub kegiatan.

Ketergantungan pembiayaan program terhadap sumber dana DAK untuk mencapai kinerja diluar program penunjang sebesar 83,38% (Rp8.655.539.000,-) dari pagu 9 program urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebesar Rp10.380.966.176,- (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah). Kondisi ini hampir sama sepanjang tahun 2021-2024. Berikut ini distribusi pagu menurut sub kegiatan dan sumber dana tahun 2024.

Tabel II.3
Pagu Definitif Tahun Anggaran 2024

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH PAGU
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.830.102.327,00
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21.681.814,00
2.08.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	2.847.410,00
2.08.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DAU	3.553.116,00
2.08.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DAU	1.937.899,00
2.08.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DAU	3.470.558,00
2.08.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DAU	5.393.553,00
2.08.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU	2.411.721,00
2.08.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	2.067.557,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.643.852.731,00
2.08.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	2.533.209.028,00
2.08.01.2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DAU	84.900.000,00
2.08.01.2.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DAU	14.636.183,00
2.08.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DAU	1.516.459,00
2.08.01.2.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	DAU	5.367.605,00

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH PAGU
	Pemeriksaan		
2.08.01.2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DAU	4.223.456,00
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		26.288.258,00
2.08.01.2.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DAU	4.447.485,00
2.08.01.2.03.000 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DAU	16.596.013,00
2.08.01.2.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DAU	5.244.760,00
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.450.000,00
2.08.01.2.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DAU	6.450.000,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		343.100.661,00
2.08.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	34.899.409,00
2.08.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DAU	31.561.507,00
2.08.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DAU	42.384.852,00
2.08.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DAU	47.406.293,00
2.08.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	6.000.000,00
2.08.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	180.848.600,00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		502.286.864,00
2.08.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	14.031.600,00
2.08.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	77.416.800,00
2.08.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	410.838.464,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		192.187.650,00

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH PAGU
2.08.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	133.131.650,00
2.08.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	12.590.000,00
2.08.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DAU	46.466.000,00
2.08.01.2.13	Penataan Organisasi		94.254.349,00
2.08.01.2.13.000 4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DAU	94.254.349,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		134.083.689,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		21.849.689,00
2.08.02.2.01.000 3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DAU	21.849.689,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		112.234.000,00
2.08.02.2.03.000 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	112.234.000,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		262.374.711,00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		40.453.623,00
2.08.03.2.01.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DAU	40.453.623,00

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH PAGU
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		12.145.970,00
2.08.03.2.02.000 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	12.145.970,00
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		209.775.118,00
2.08.03.2.03.000 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	209.775.118,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		288.937.352,00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		288.937.352,00
2.08.04.2.01.000 2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	88.937.757,00
2.08.04.2.01.000 3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	199.999.595,00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		13.885.116,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		13.885.116,00
2.08.05.2.01.000 1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	13.885.116,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		117.329.506,00

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH PAGU
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		49.445.712,00
2.08.06.2.01.000 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	49.445.712,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		67.883.794,00
2.08.06.2.02.000 1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	47.114.365,00
2.08.06.2.02.000 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU	20.769.429,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		238.523.867,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		82.670.265,00
2.08.07.2.01.000 3	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	DAU	23.997.365,00
2.08.07.2.01.000 4	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	DAU	58.672.900,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		155.853.602,00

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH PAGU
2.08.07.2.02.000 5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU	109.803.947,00
2.08.07.2.02.000 6	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	DAU	46.049.655,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		440.059.057,00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		104.359.057,00
2.14.02.2.01.000 2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	DAU	104.359.057,00
2.14.02.2.01.002 1	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	DAU	0
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		335.700.000,00
2.14.02.2.02.001 2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DAK NF BOKB	159.000.000,00
2.14.02.2.02.001 3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DAK NF BOKB	176.700.000,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		5.631.533.614,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1.460.199.733,00
2.14.03.2.01.000 8	Pengendalian Program KKBPK	DAK NF BOKB	139.999.996,00
2.14.03.2.01.001 0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	DAK NF BOKB	630.800.000,00
2.14.03.2.01.001 1	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	DAK NF BOKB	285.000.000,00

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH PAGU
	Lokakarya (Minilok)		
2.14.03.2.01.001 2	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DAK NF BOKB	99.999.690,00
2.14.03.2.01.001 3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	DAU	102.000.047,00
2.14.03.2.01.001 4	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DAK NF BOKB	202.400.000,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		621.999.760,00
2.14.03.2.02.000 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DAK NF BOKB	579.000.000,00
2.14.03.2.02.000 6	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DAU	42.999.760,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		3.019.688.994,00
2.14.03.2.03.000 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK NF BOKB	18.000.000,00
2.14.03.2.03.000 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK NF BOKB	570.819.000,00
2.14.03.2.03.000 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DAK F BOKB	2.409.669.994,00
2.14.03.2.03.000 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK NF BOKB	21.200.000,00

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH PAGU
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		529.645.127,00
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	DAU	113.895.127,00
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK NF BOKB	415.750.000,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		3.254.239.264,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		426.399.750,00
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	DAK NF BOKB	28.800.000,00
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAK NF BOKB	297.600.000,00
2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	DAU	99.999.750,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		2.827.839.514,00
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	DAU	207.039.514,00
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja	DAK NF BOKB	1.248.000.000,00

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH PAGU
	Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	DAK NF BOKB	1.372.800.000,00
Jumlah Pagu			14.211.068.503,00

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas menempati kantor yang berdiri di atas lahan seluas 790,5 meter persegi milik Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sambas yang berada di Jalan Pembangunan Sambas dan mulai digunakan pada bulan Maret tahun 2013. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel II.4
Komposisi Jumlah Perlengkapan Jumlah Barang Inventaris

No	Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7	Unit
2	Kendaraan Bermotor Roda Dua	60	Unit
3	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	Casio/6	Unit
4	Lemari Besi/Metal (Lemari Arsip)	24	Buah
5	Lemari Kayu (Lemari Buku)	9	Buah
6	Rak Besi (Rak TV)	7	Buah
7	Rak Kayu	24	Buah
8	Filling Cabinet Besi (Lemari File)	5	Buah
9	Brandkas	1	Buah
10	Buffet	3	Buah
11	Lemari Kaca	8	Buah
12	Lemari Makan	1	Buah
13	Rak Buku (Rak Buku Rumah Data)	1	Buah
14	CCTV - Camera Control Television System	1	Set
15	Papan Visual/Papan Nama (Papan Nama Rumah Data)	1	Buah

No	Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
16	LCD Projector/Infocus	48	Unit
17	Focusing Screen/Layar LCD Projector	6	Buah
18	Papan Nama Instansi	2	Buah
19	Papan Pengumuman (Papan White Board)	28	Buah
20	Papan Tulis Roda	1	Buah
21	Teralis	4	Buah
22	Trolly (Alat Kantor Lainnya)	1	Buah
23	Meja Kerja Kayu	70	Buah
24	Kursi Besi/Metal (Kursi Kerja)	1	Buah
25	Meja Rapat	31	Buah
26	Tempat Tidur	6	Buah
27	Meja Resepsionis (Meja Informasi)	1	Buah
28	Meja 1/2 Biro	51	Buah
29	Kasur/Spring Bed	21	Buah
30	Kursi Tamu	21	Buah
31	Kursi Putar	46	Buah
32	Meja Komputer	4	Buah
33	Sofa	1	Set
34	Lemari Pakaian 2 Pintu	2	Buah
35	Meja Televisi	1	Buah
36	Mesin Potong Rumput	1	Unit
37	Lemari Es	1	buah
38	A.C Split	10	Unit
39	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	11	Unit
40	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	Buah
41	Tabung Gas	1	Buah
42	Televisi	3	Unit
43	Amplifier	1	Unit
44	Equalizer	4	Unit
45	Loudspeaker (Speaker Box 12")	2	Buah
46	Mesin Jahit	2	Buah
47	Tiang Bendera	1	Buah
48	Dispenser	5	Buah
49	Mesin Jahit Obras	1	Buah
50	Gorden/Kray	2	Set
51	Pompa air	1	Buah
52	Vaccum Sealer	1	Buah
53	Meja Kompas Gas	1	Buah
54	Alat Pemadam/Portable (Racun Api)	1	Buah
55	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	Buah

No	Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	23	Buah
57	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	11	Buah
58	Camera Digital	1	Unit
59	Facsimile	1	Buah
60	Alat Komunikasi Public Address (Lapangan)	23	Buah
61	Sterilizer Cabinet/Sterilisator	1	Unit
62	Lemari Obat (Kaca)	2	Buah
63	Personal Computer Unit	86	Unit
64	Lap Top	21	Unit
65	Handphone/ Smartphone Tablet PC	42	Unit
66	Printer (Peralatan Personal Komputer)	95	Unit
67	Stabilizer/UPS (Peralatan Personal Komputer)	26	Unit

Ketersediaan sumber daya yang ada relatif belum berimbang untuk mampu mendorong optimalisasi capaian kinerja. Khususnya kebutuhan akan aspek ketenagaan dan aspek keuangan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan

Tabel dan grafik dalam menggambarkan kinerja menggunakan dua istilah yaitu realisasi dan capaian. Realisasi diartikan sebagai data hasil pengukuran indikator dimaksud dilapangan, sedangkan capaian diartikan sebagai ukuran hasil perbandingan antara realisasi dengan target. Capaian dengan nilai melebihi 100% (seratus persen) berarti telah melewati target dan sebaliknya.

Dilihat dari data yang tersedia menunjukkan rata-rata tren realisasi Indikator Kinerja Utama dari tahun 2021 sd 2024 menunjukkan terjadi peningkatan. Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Klaster I mencapai rata-rata kenaikan tertinggi yaitu sebesar 111% periode tahun 2021 sd 2024. Sedangkan indikator dengan capaian rata-rata terendah yaitu ASFR sebesar 68% periode tahun 2021 sd 2024 dan merupakan satu-satunya indikator dengan capaian di bawah 80%. Hal ini menggambarkan konsistensi perencanaan penganggaran terhadap target sasaran strategis untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sambas.

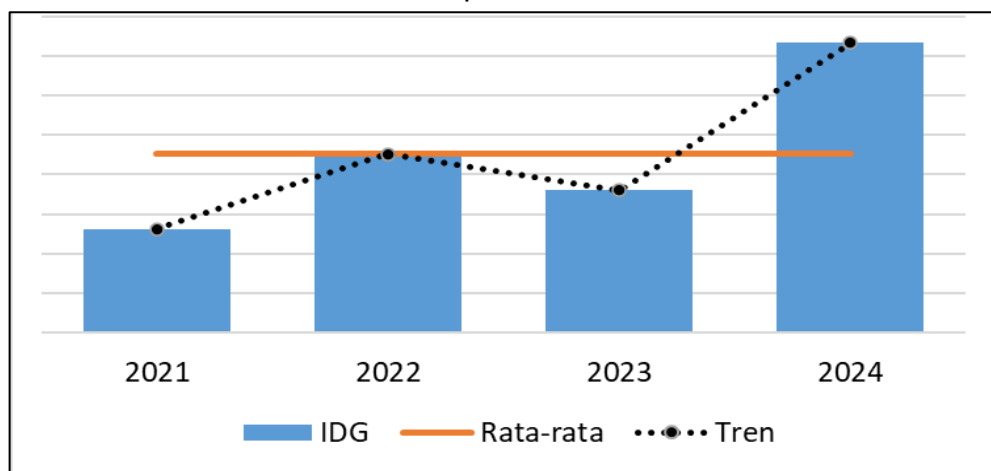
Tabel II.5
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun				Capaian Kinerja Tahun				Rata-rata capaian
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,26 %	69,03 %	67,20 %	74,66 %	79%	105,7 %	100%	107,8 %	95%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Klaster I	300 poin	336,0 5 poin	404,3 poin	618,71 poin	105,3 %	112,0 2%	101%	123,7 4%	111%
3.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata anak per Wanita)	2,61 (Hasil PK 21)	2,61 (Hasil PK 21)	2,43 (Hasil PK 23)	2,44 (Hasil PK 24)	94,33 %	94,33 %	101,6 2%	101,6 %	98%
		2. Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	57,3 % (Hasil PK 21)	56,6 % (Hasil PK 22)	60,5 % (Hasil PK 23)	69,25 % (Hasil PK 24)	101,6 7%	99,58 %	105,5 5%	119,8 1%	107%
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	19,7 % (Hasil PK 21)	12,3 % (Hasil PK 22)	8,4% (Hasil PK 23)	9,7% (Hasil PK 24)	38,52 %	96,64 %	127,5 9%	114,1 6%	94%
		4. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	38,6 (Hasil PK 21)	38,6 (Hasil PK 21)	28,7 (Hasil PK 23)	32,3 (Hasil PK 24)	48,03 %	48,03 %	87,01 %	127%	68%
		5. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) (Tahun)	21,1 (Hasil PK 21)	21,5 (Hasil PK 22)	21 (Hasil PK 23)	20,9 (Hasil PK 24)	101,8 6%	100%	102,3 3%	102,8 %	102%
4.	Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	52,15 (Hasil PK 21)	55,85 (Hasil PK 22)	55,85 (Hasil PK 22)	59,24 (Hasil PK 24)	74,5 %	79,79 %	79,79 %	84,6 %	80%

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif

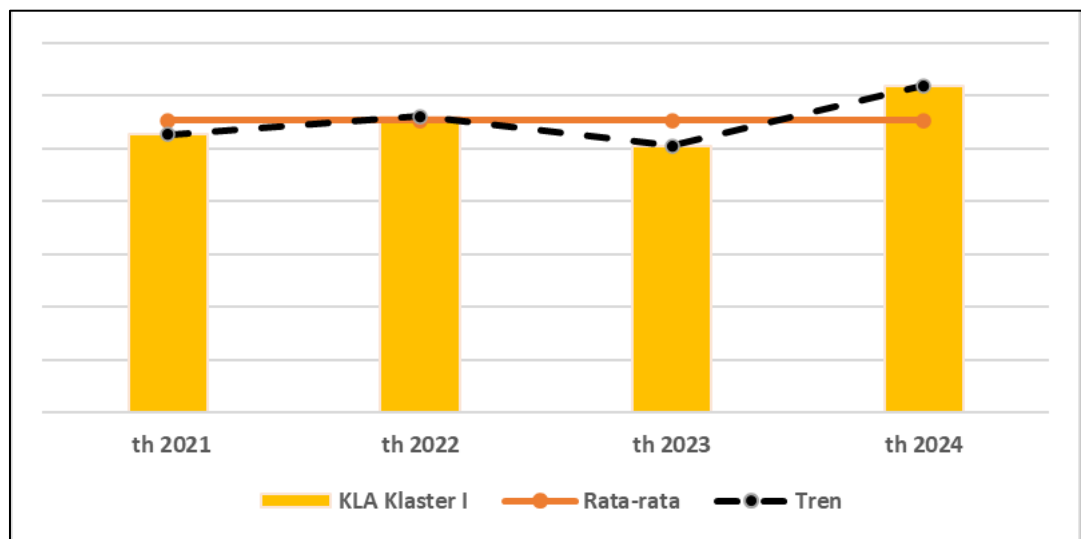
dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Tren IDG menunjukkan peningkatan sebesar 14,34% pada tahun 2024 dan berada di atas rata-rata pada tahun 2022-2024. Hal ini menggambarkan peran perempuan dalam berpolitik, ekonomi dan pengambilan keputusan telah berfungsi positif dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas. (Grafik di bawah ini).

Grafik II.1
Tren Capaian IDG



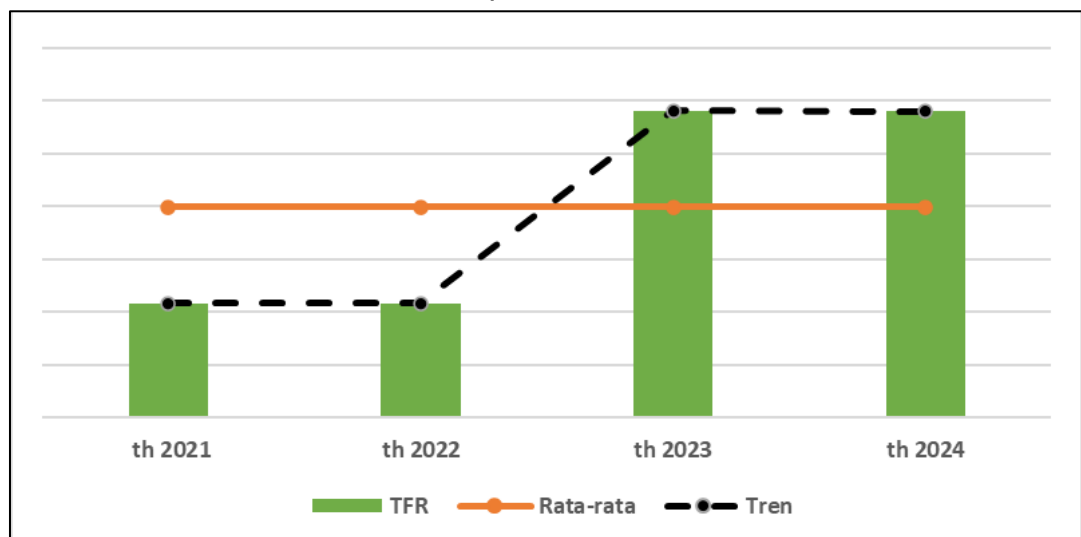
Kota Layak Anak (KLA) adalah sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di kota atau kabupaten. Penilaian KLA dilakukan berdasarkan kluster-kluster yang mencakup berbagai aspek yang mendukung kesejahteraan anak. Pada penilaian KLA, Klaster 1 merujuk pada "Pemenuhan Hak Anak". Tren capaian KLA Klaster 1 menunjukkan peningkatan tertinggi sebesar 23% pada tahun 2024 dan berada di atas rata-rata pada tahun yang sama. Hal ini menggambarkan anak telah mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan Anak, Hak untuk Mengakses Pendidikan, Hak untuk Kesehatan dan Lingkungan yang Sehat, dan Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi sesuai tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas. (Grafik di bawah ini).

Grafik II.2
Tren Capaian KLA Klaster I



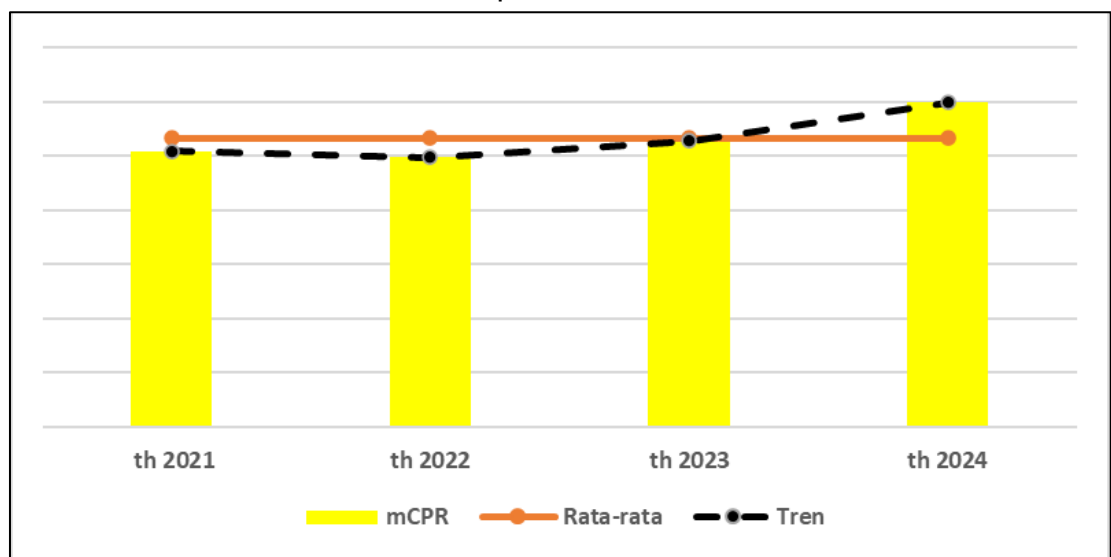
Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Tren TFR menunjukkan terjadi peningkatan tertinggi sebesar 7% pada tahun 2023 dan berada di atas rata-rata pada tahun 2023-2024. Hal ini menggambarkan upaya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk pada fase masa reproduksi seorang perempuan telah berjalan sesuai tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas. (Grafik di bawah ini).

Grafik II.3
Tren Capaian TFR



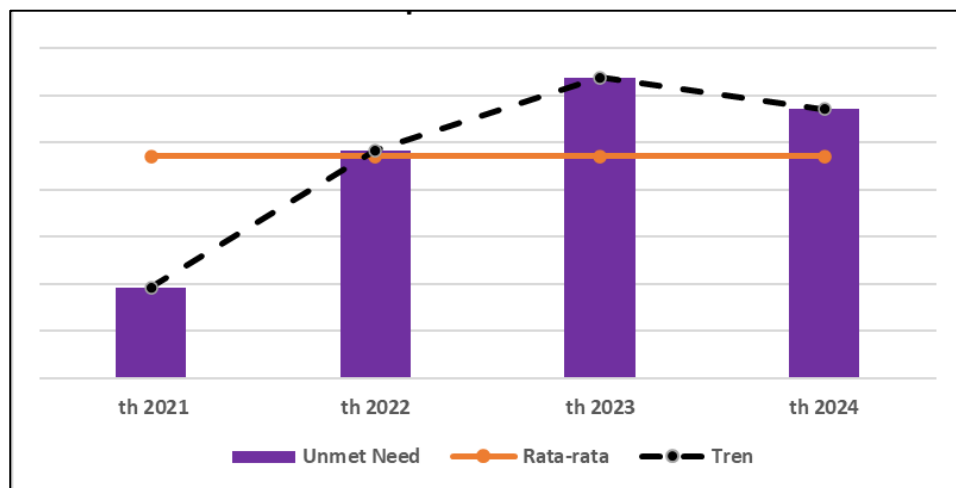
Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) mengukur Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu. Tren capaian mCPR menunjukkan peningkatan tertinggi sebesar 14% pada tahun 2024 dan berada di atas rata-rata periode tahun 2021 sd 2024. Hal ini menggambarkan upaya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) melalui kegiatan penggunaan kontrasepsi moderen oleh PUS telah terlaksana sesuai dengan tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas.

Garfik II.4
Tren Capaian mCPR



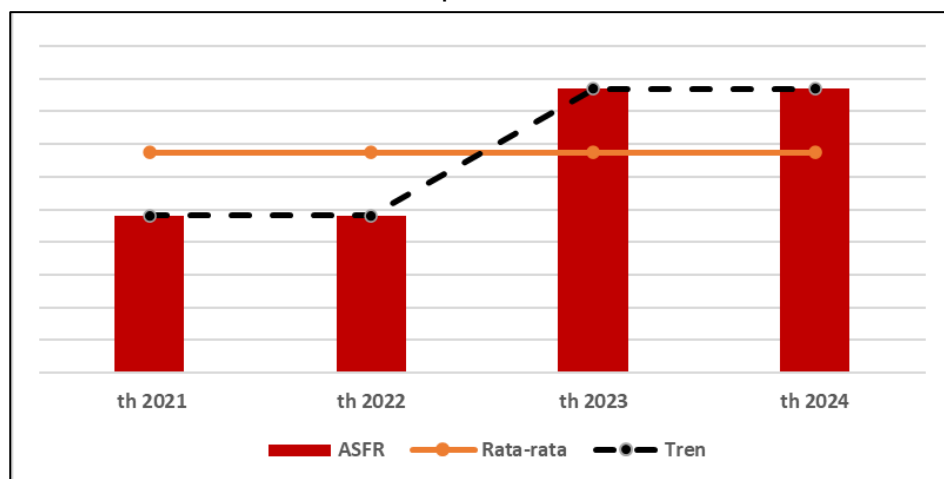
Unmet Need adalah kebutuhan pasangan usia subur untuk berKB tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Kebutuhan tersebut adalah tidak ingin anak lagi (TIAL) atau ingin anak ditunda (IAT) tetapi PUS tidak memakai alat kontrasepsi. Tren *Unmet Need* menunjukkan peningkatan tertinggi sebesar 58% pada tahun 2023 dan berada di atas rata-rata pada tahun 2023-2024. Hal ini menggambarkan jangkauan terhadap PUS yang tidak memakai kontrasepsi telah mendapat perhatian atau pemenuhan yang memadai oleh layanan atau sumber daya yang ada, sesuai tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas. (Grafik di bawah ini).

Grafik II.5
Tren Capaian Unmet Need



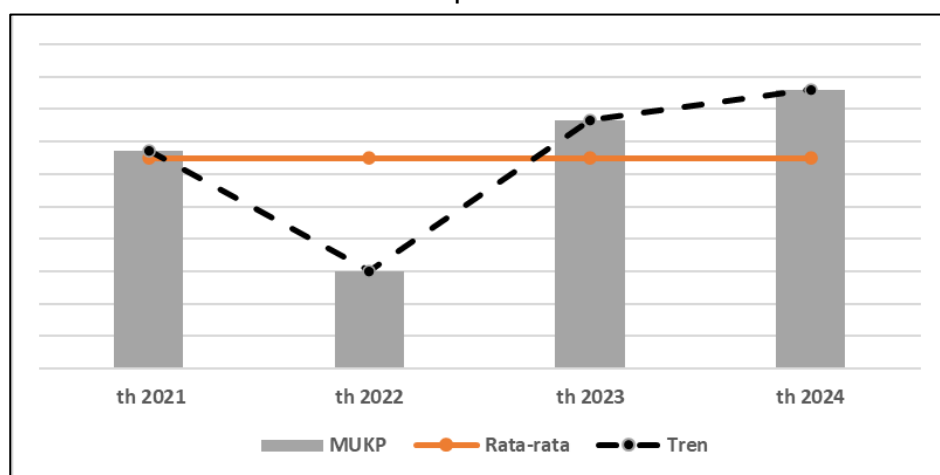
Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) mengukur banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Pola ASFR membentuk huruf U terbalik. Tren capaian ASFR tertinggi sebesar 39% pada tahun 2023 dan berada di atas rata-rata pada tahun 2023-2024. Hal ini menggambarkan upaya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) melalui pengendalian kelahiran dari wanita usia 15-49 tahun terlaksana sesuai tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas. (Grafik di bawah ini).

Grafik II.6
Tren Capaian ASFR



Median Usia Kawin Pertama (MUKP) untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur 25-49 tahun sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei. Tren capaian MUKP menunjukkan peningkatan tertinggi sebesar 2% pada tahun 2023 dan berada di atas rata-rata pada tahun 2023-2024. Hal ini menggambarkan upaya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) melalui pengendalian usia perkawinan telah terlaksana sesuai dengan tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas.

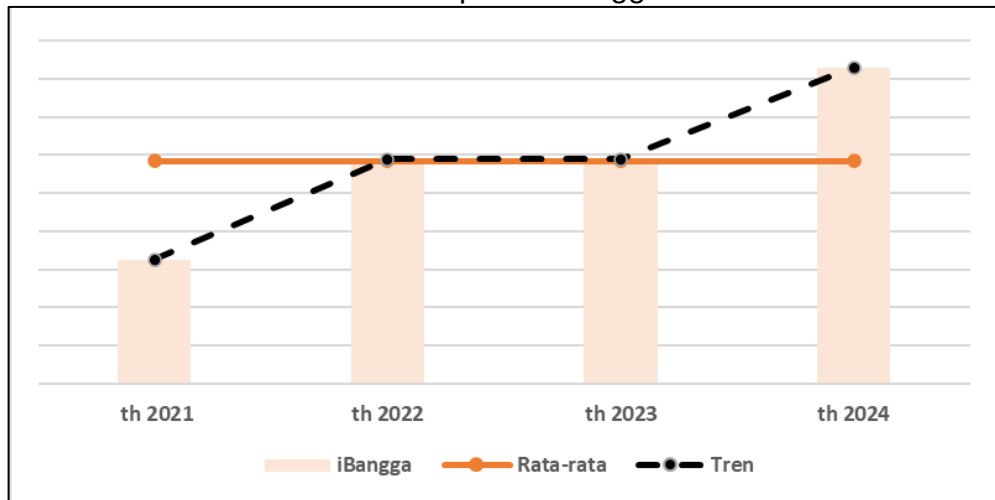
Grafik II.7
Tren Capaian MUKP



Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Tren capaian iBangga menunjukkan peningkatan yang sama sebesar 5% pada tahun 2022 dan tahun 2024, serta berada di atas rata-rata pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan kualitas kehidupan keluarga berdasarkan berbagai faktor penting yang memengaruhi kesejahteraan mereka, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial telah dilaksanakan sesuai

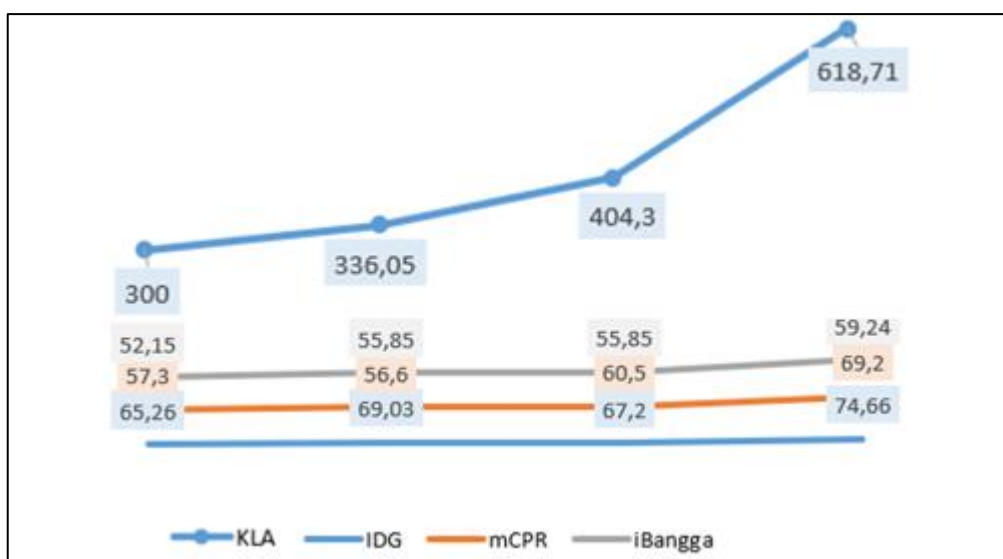
dengan tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas. (Grafik di bawah ini).

Grafik II.8
Tren Capaian iBangga

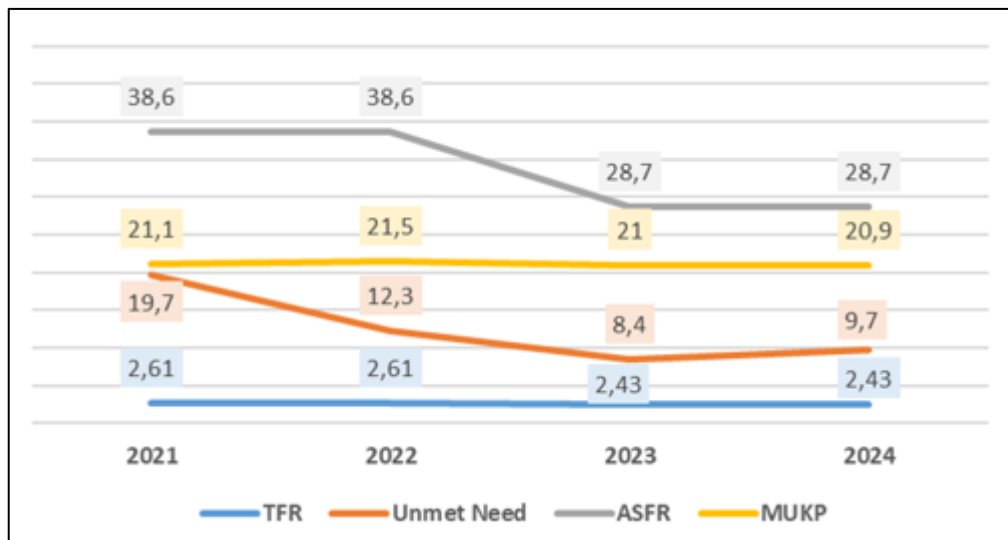


Indikator Kinerja Utama (IKU) dikategorikan dalam 2 status yaitu positif dan negatif. Status positif apabila realisasi lebih besar dari realisasi sebelumnya dinyatakan semakin baik. Sedangkan status negatif apabila realisasi lebih kecil dari realisasi sebelumnya dinyatakan semakin baik. Grafik II.8 dan grafik II.9 memperlihatkan tren tahun 2021-2024 pada arah yang semakin baik.

Grafik II.9
Tren Realisasi IKU untuk Indikator Positif



Grafik II.10
Tren Realisasi IKU untuk Indikator Negatif



Rata-rata capaian IKU tahun 2021-2024 memberikan gambaran tingkat realisasi terhadap target dalam 4 tahun terakhir. Hal ini dapat diartikan sebagai gambaran kinerja dan rumusan kinerja yang masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan ditahun mendatang. Grafik II.10, tampak bahwa pembangunan keluarga, dan kelahiran dari anak usia 15-19 tahun masih perlu menjadi perhatian serius pada perencanaan berikutnya.

Grafik II.11
Rata-rata Capaian IKU tahun 2021-2024



Indikator Kinerja Kunci tahun 2024 tertuang dalam indikator sasaran

dan program. Pencapaian IKU tidak terlepas dari dukungan pencapaian kinerja sasaran, program kegiatan. Sebanyak 6 indikator (46,15%) telah mencapai target yang ditetapkan, sementara yang tidak mencapai target sebanyak 7 indikator (53,85%). Hanya sebanyak 2 indikator (15,38%) berada di posisi capaian kurang dari 80% dari 13 indikator yang tersedia datanya. Adapun indikator sasaran dan indikator program dengan capaian dibawah 80% yaitu Persentase ARG pada belanja operasi APBD (capaian 56,25%) dan Rasio Akseptor KB (capaian 77,76%). Uraian capaian sasaran dan program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.6
Capaian Kinerja Sasaran dan Program

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2024			
			Target	Capaian	Persentase Kinerja	Keterangan
1.1	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta kesetaraan gender	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7 per 100.000 penduduk perempuan	3 per 100.000 penduduk perempuan	157,14%	Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan dari Satgas Unit Penanganan Terpadu. Indikator negatif.
1.1.1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	80%	45%	56,25%	Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antara OPD penggerak PUG yaitu Bappeda, DP3AP2KB, Bakeuda dan Inspektorat daerah sehingga peran dan fungsi masing-masing driver dalam PUG tidak terlaksana sesuai harapan. Masih lemahnya penguatan untuk aplikasi GAP dan GBS dalam penyusunan RKA dan DPA

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2024			
			Target	Capaian	Persentasi Kinerja	Keterangan
1.1.2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	Semua perempuan korban kekerasan termasuk TPPO terlayani secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan korban.
1.1.3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Meningkatnya kualitas keluarga melalui perwujudan kesetaraan gender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	64,5%	59,91%	92,88%	TPAK Kabupaten Sambas pada tahun 2023 didapat angka 53,11%, BPS.
1.1.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak	100%	100%	100%	Data gender tersedia di tiap OPD salah satunya ditandai dengan pemilahan kolom menurut jenis kelamin pada setiap daftar hadir

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2024			
			Target	Capaian	Persentasi Kinerja	Keterangan
2.1	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	Laporan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPPA)
2.1.1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Meningkatnya skor indikator pemenuhan Hak Anak	Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak	250 poin	331,6 poin	132,64%	Nilai bobot evaluasi Kabupaten Layak Anak klaster I sampai klaster IV terpenuhi. Hasil penilaian mandiri KLA
2.1.2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Meningkatnya skor indikator Perlindungan khusus anak	Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak	90 poin	153 poin	170%	Nilai bobot evaluasi Kabupaten Layak Anak klaster V terpenuhi. Hasil penilaian mandiri KLA
3.1	Meningkatnya pengendalian penduduk	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	1,28 orang	1,13 orang	88,28%	Data bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sambas, diolah.

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2024			
			Target	Capaian	Persentasi Kinerja	Keterangan
3.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Meningkatnya pengendalian pertambahan penduduk dalam keluarga	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3,60 orang	3,54 orang	98,33%	Data bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sambas, diolah.
3.2	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	14,80%	9,70%	134,5%	Sumber data BKKBN Pusat (PK 2024). Indikator negatif.
3.2.1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya cakupan peserta KB	Rasio Akseptor KB	89,41%	69,52%	77,76%	Dimana saat entri data akseptor KB dalam new SIGA menggunakan NIK namun tidak semua akseptor saat pelayanan membawa/memiliki KTP. Selain itu cukup banyak PUS yang bekerja keluar negara.
3.2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya cakupan	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	89,41%	90%	99,99%	Data bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sambas, diolah.

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2024			
			Target	Capaian	Persentasi Kinerja	Keterangan
	Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga					

Secara umum kendala yang dihadapi bervariasi untuk setiap upaya pencapaian kinerja. Gambaran lebih rinci atas hambatan dan upaya perbaikan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.7
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

No	Sasaran Strategis	Program	Analisis capaian kinerja	Hambatan capaian kinerja	Upaya Perbaikan capaian kinerja
1	Meningkatnya capaian pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Gambaran atas ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas. Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 100%; tingkat efisiensi 102,9% (sangat efisien); tingkat efektifitas 100%(efektif seimbang); dan kategori prioritas program perlu pemeliharaan		
1	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Gambaran meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik diukur dengan indikator persentase ARG pada belanja langsung A PBD. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Anggaran yang diukur hanya anggaran dari OPD yang telah mendapat pelatihan ARG. Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 56,25%, tingkat efisiensi 64,9% (tidak efisien); tingkat efektifitas 125% (sangat efektif); dan kategori prioritas program perlu pengembangan.	• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana	• Peningkatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten • Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten
		Program Perlindungan Perempuan	Gambaran meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan diukur dengan indikator persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif. Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat pelayanan dari Satgas Unit Pelayanan Terpadu sesuai dengan standar layanan dan kebutuhan korban. Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 100%; tingkat efisiensi 102,1% (sangat efisien); tingkat efektifitas 100% (efektif seimbang); dan kategori prioritas program perlu pemeliharaan.	• Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus • Masih rendahnya perlindungan terhadap pekerja migrant perempuan yang ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap pekerja migran perempuan.	• Peningkatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten • Peningkatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan

No	Sasaran Strategis	Program	Analisis capaian kinerja	Hambatan capaian kinerja	Upaya Perbaikan capaian kinerja
					bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Gambaran meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender diukur dengan indikator partisipasi angkatan kerja perempuan. Penduduk perempuan yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk perempuan usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Hasil penilaian dan analisis didapat Capaian kinerja 92,88%; tingkat efisiensi 96,2% (tidak efisien); tingkat efektifitas 155% (sangat efektif); dan kategori prioritas program perlu pengembangan	• Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen • Kesenjangan pengeluaran perkapita perempuan jauh lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita laki-laki.	• Mendorong Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Gambaran meningkatnya ketersediaan data gender dan anak diukur dengan indikator persentase OPD yang menyediakan Data Gender dan Anak. Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 100%; tingkat efisiensi 122,7% (sangat efisien); tingkat efektifitas 100% (efektif seimbang); dan kategori prioritas program perlu pemeliharaan.	• Belum optimalnya penggunaan data terpilah gender yang menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan	• Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten
2	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Gambaran meningkatnya skor indikator pemenuhan Hak Anak diukur dengan indikator nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak (Meningkat 3%). Pelindungan Anak diwujudkan dalam KLA, Indikator KLA terdiri dari Penguatan kelembagaan dan Klaster Hak Anak. Pemenuhan Hak Anak dapat diwujudkan dalam klaster I (hak sipil dan kebebasan), klaster II (lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif), Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan), Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya). Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 132,64%; tingkat efisiensi 136% (sangat efisien); tingkat efektifitas 132,6% (sangat efektif); dan kategori prioritas program perlu pemeliharaan.	• Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran. • Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD. • Tingginya kematian pada bayi dan balita. • Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita • Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar. • Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak. • Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak • Belum semua sekolah termasuk kategori	• Peningkatan Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Program	Analisis capaian kinerja	Hambatan capaian kinerja	Upaya Perbaikan capaian kinerja
				sekolah ramah anak.	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Gambaran meningkatnya skor indikator Perlindungan khusus anak diukur dengan indikator nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak (Meningkat 3%). Pelindungan Anak diwujudkan dalam KLA, Indikator KLA terdiri dari Penguatan kelembagaan dan Klaster Hak Anak. Pelindungan Khusus anak dapat diwujudkan dalam klaster 5 (Perlindungan Khusus). Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 170%; tingkat efisiensi 174,8% (sangat efisien); tingkat efektifitas 170% (sangat efektif); dan kategori prioritas program perlu pemeliharaan.	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) • Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cybercrime.	• Peningkatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten
3	Meningkatnya pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Gambaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia diukur dengan indikator rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga. Rata-rata jumlah jiwa/orang dalam satu keluarga menggambarkan kepadatan penduduk dalam satu keluarga. Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 98,33%; tingkat efisiensi 104,7% (sangat efisien); tingkat efektifitas 98,3% (tidak efektif); dan kategori prioritas program perlu pengembangan.	• Pilihan alat kontrasepsi Keluarga Berencana bagi pria yang masih terbatas • Masih kurangnya pengetahuan dan kinerja PPKBD dan Sub PPKBD terhadap program Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera di pedesaan untuk mendukung Penurunan Angka Laju Pertumbuhan	• Peningkatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
4	Meningkatnya kualitas keluarga melalui keluarga berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Gambaran meningkatnya cakupan peserta KB diukur dengan indikator rasio Akseptor KB. Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru pertama kali menggunakan Alat Kontrasepsi serta PUS yang kembali menggunakan Alat Kontrasepsi pasca melahirkan atau keguguran. Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 77,76%; tingkat efisiensi 79,5% (tidak efisien); tingkat efektifitas 111,7% (sangat efektif); dan kategori prioritas program perlu pengembangan.	• Pelayanan Keluarga Berencana di klinik Keluarga Berencana yang masih perlu ditingkatkan • Masih lemahnya Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Kesetaraan Gender dalam program Keluarga Berencana • Tahapan kelompok PIK KRR yang masih lemah • Pencatatan dan pelaporan pelayanan Keluarga Berencana yang belum maksimal • Belum maksimalnya sarana mobil unit pelayanan dan penerangan Keluarga Berencana	• Peningkatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal • Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) • Peningkatan Pengendalian dan Pendistribusian

No	Sasaran Strategis	Program	Analisis capaian kinerja	Hambatan capaian kinerja	Upaya Perbaikan capaian kinerja
					Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten • Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Gambaran meningkatnya cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga diukur dengan indikator cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga. Kegiatan pembinaan pada kelompok catur bina (BKB, BKR, BKL dan BEK) dengan pendekatan 8 fungsi keluarga (Fungsi Agama, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Cinta Kasih dan Kasih sayang, Perlindungan, Reproduksi, Sosial dan Pendidikan, Ekonomi dan Lingkungan.. Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 99,99%; tingkat efisiensi 88,3% (tidak efisien); tingkat efektifitas 111,1% (sangat efektif); dan kategori prioritas program perlu pengembangan.	• Masih kurangnya pelatihan kader Posyandu model melalui kegiatan BKB-Posyandu terintegrasi • Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kader BKB terampil dalam memahami teknik pembinaan • Masih kurangnya kemampuan bakat dan ketrampilan ibu balita yang punya usaha dalam menambah penghasilan keluarga melalui kelompok kegiatan	• Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga • Peningkatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

2.1.4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah perempuan dan anak-anak usia 0-18 tahun yang rentan mengalami kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, khususnya yang berada di wilayah dengan tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, atau pernikahan usia dini yang masih tinggi. Adapun sasaran utama mencakup:

- Perempuan kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan remaja perempuan
- Anak-anak usia sekolah dan pra-sekolah, terutama di daerah miskin dan terpencil
- Lembaga masyarakat dan tokoh adat/keagamaan yang berperan dalam penguatan norma perlindungan perempuan dan anak.

Sasaran difokuskan kepada:

- Perempuan korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, perdagangan orang, dan pekerja perempuan di sektor informal.
- Anak-anak dari keluarga rentan, termasuk anak jalanan, anak korban kekerasan, anak terlantar, dan anak penyandang disabilitas.
- Remaja perempuan, yang rentan terhadap pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan serta informasi kesehatan reproduksi.

Sedangkan kelompok sasaran urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah pasangan usia subur (PUS), terutama mereka yang belum ber-KB atau berisiko tinggi terhadap kehamilan yang tidak direncanakan. Fokus diberikan pada:

- Remaja dan calon pengantin, melalui edukasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga dan pernikahan usia ideal.
- Pasangan muda, agar memiliki pemahaman dan akses terhadap layanan KB modern
- Keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup melalui pengaturan jumlah dan jarak kelahiran, serta peningkatan kesejahteraan.

- Ibu menyusui dan ibu dengan anak balita, sebagai sasaran layanan KB pasca-persalinan serta edukasi pola asuh anak yang sehat dan berkualitas.
- Kelompok masyarakat dan tokoh lokal, sebagai mitra strategis dalam menyosialisasikan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
- Selain kelompok sasaran langsung, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga menysasar kelompok-kelompok pendukung strategis baik dari sisi masyarakat maupun tenaga pemberi layanan dalam mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan ramah, seperti:
- Kader kesehatan, penyuluh KB, petugas PPA dan tenaga sosial, sebagai ujung tombak pelayanan dan edukasi di tingkat akar rumput.
- Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi perempuan/anak, sebagai penggerak perubahan norma sosial dan budaya yang mendukung kesetaraan gender, keluarga berkualitas, dan perlindungan hak-hak anak.
- Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal, untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada generasi muda.
- Keluarga berisiko *stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan anak mengalami *stunting* (gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan - sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun).

2.1.5. Mitra Pemberi Pelayanan

Mitra adalah pihak yang terlibat dalam kemitraan baik berupa organisasi, kelompok, atau individu yang memberikan kontribusi nyata berupa sumber daya, keahlian, jaringan, atau fungsi lain sesuai peran yang telah disepakati. Kemitraan adalah bentuk kerja sama formal antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai hasil bersama berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan saling percaya. Secara teknis, kemitraan mencakup:

- Interaksi dan hubungan (interelasi) minimal antara pihak-pihak yang disebut mitra.
- Suatu proses kolaboratif yang bersifat sukarela untuk memajukan kepentingan bersama.
- Keterlibatan berbagai aktor individu, kelompok, lembaga pemerintah, atau non-pemerintah dengan pembagian peran yang jelas dan kesepakatan bersama.
- Pembagian tugas, risiko, dan keuntungan, dengan evaluasi dan penyusunan ulang kesepakatan jika diperlukan

Tabel II.8
Bentuk Kemitraan dengan Mitra

No	Nama Mitra per Urusan	Teknis Kemitraan
Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
1	Perangkat Daerah: • Dinas Sosial • Dinas Kesehatan • Dinas Pendidikan • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinas Koperasi & UMKM • Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) • Bapperida • Pengadilan Agama	• Koordinasi program pemberdayaan perempuan & perlindungan anak • Layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi perempuan dan anak • Penyusunan kebijakan daerah & rencana aksi • Penanganan korban kekerasan dan trafficking • Layanan konseling perkawinan anak
2	Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Hukum: • Polres (Unit PPA) • Kejaksaan Negeri • Pengadilan Negeri • Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	• Penegakan hukum pada kasus kekerasan terhadap perempuan & anak • Pendampingan hukum dan perlindungan saksi/korban • Edukasi hukum dan sosialisasi peraturan
3	Layanan Kesehatan: • RSUD • Puskesmas • Klinik layanan korban kekerasan	• Pemeriksaan dan pemulihan medis untuk korban kekerasan • Rujukan kasus • Pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan & anak
4	Lembaga Masyarakat / Organisasi Sosial Lokal: • Organisasi perempuan (PKK, Dharma Wanita) • LSM lokal yang fokus pada isu gender, anak, atau kekerasan • Karang Taruna / Forum Anak Daerah	• Pendampingan masyarakat • Sosialisasi & edukasi di tingkat desa/kelurahan • Pemberdayaan ekonomi perempuan
5	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: • MUI, NU, Muhammadiyah lokal • Pemuka adat	• Penyebaran nilai-nilai perlindungan anak dan perempuan melalui khotbah, ceramah, dan kegiatan keagamaan • Mediasi sosial • Advokasi berbasis nilai lokal dan agama
6	Lembaga Pendidikan: • SD, SMP, SMA, dan sekolah kejuruan	• Pendidikan kesetaraan gender dan perlindungan anak

No	Nama Mitra per Urusan	Teknis Kemitraan
	• PAUD • Perguruan tinggi di kabupaten	• Sekolah ramah anak • Pencegahan kekerasan dan perundungan
7	Dunia Usaha Lokal / UMKM: • Perusahaan di wilayah kabupaten • UMKM dan koperasi wanita • Asosiasi pengusaha lokal	• Pemberdayaan ekonomi perempuan • Program CSR untuk perempuan dan anak • Pelatihan kewirausahaan
8	Media Lokal: • Radio daerah • Surat kabar lokal • Media sosial komunitas	• Kampanye publik • Sosialisasi program PPPA • Diseminasi informasi dan pelaporan kasus
Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana		
1	Pemerintah Daerah: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kemenag	○ Menyediakan fasilitas pelayanan KB (puskesmas, posyandu) ○ Pelatihan tenaga penyuluh dan bidan ○ Integrasi materi KB dalam pendidikan formal ○ Layanan penyuluhan perkawinan materi stunting
2	TNI/Polri: TNI AD melalui program Bhakti TNI KB Kesehatan	○ Kegiatan pelayanan KB massal (pemasangan implan, IUD, dll.) ○ Sosialisasi program KB di wilayah terpencil dan perbatasan ○ Menggerakkan masyarakat untuk ikut program KB
3	Organisasi Masyarakat dan LSM: PKK, Fatayat NU, Aisyiyah	○ Sosialisasi program KB berbasis komunitas ○ Pemberdayaan perempuan dalam kesehatan reproduksi ○ Pelatihan kader KB di desa-desa
4	Swasta/Perusahaan: Perusahaan melalui CSR (Corporate Social Responsibility)	○ Penyediaan fasilitas dan alat kontrasepsi di lingkungan kerja ○ Edukasi kesehatan reproduksi bagi karyawan ○ Dukungan dana/sarana untuk kegiatan KB di masyarakat sekitar
5	Lembaga Pendidikan: Sekolah dan Perguruan Tinggi	○ Pendidikan Kependudukan dan KB di kurikulum sekolah ○ Program Generasi Berencana (GenRe) di kalangan remaja dan mahasiswa ○ Pembentukan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)
6	Media Massa dan Influencer: Televisi, radio, media daring, YouTuber, selebgram	○ Kampanye publik dan edukasi mengenai KB dan pengendalian penduduk ○ Penyebaran informasi melalui iklan layanan masyarakat ○ Penyuluhan daring mengenai kesehatan reproduksi
7	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: Ulama, pendeta, pemuka adat	○ Penyuluhan KB yang sesuai dengan nilai budaya dan agama ○ Menghilangkan stigma atau salah persepsi tentang KB ○ Mendukung penerimaan masyarakat terhadap program KB
Catatan: Mitra dan teknis kemitraan dapat berubah sesuai dengan kondisi kekinian.		

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan dapat diartikan sebagai "*gap expectation*" yaitu kesenjangan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai dengan target yang direncanakan, serta antara visi masa depan dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Secara umum, permasalahan ini muncul akibat potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang terabaikan, serta ancaman yang tidak diantisipasi dengan baik.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan di masa lalu. Proses identifikasi ini mencakup analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari bidang pengampu urusan.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Adapun kriteria yang digunakan dalam identifikasi permasalahan meliputi:

1. Memiliki cakupan yang luas: Masalah ini mempengaruhi banyak orang, wilayah, atau sektor, sehingga dampaknya dirasakan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Berpotensi meningkat atau membesar di masa mendatang serta berdampak negatif: Jika tidak segera ditangani, masalah ini dapat berkembang lebih besar dan menimbulkan konsekuensi yang semakin serius bagi masyarakat dan lingkungan.
3. Membutuhkan penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu dengan melibatkan sinergi berbagai pihak: Penyelesaian masalah ini memerlukan upaya berkelanjutan serta koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai solusi yang efektif.
4. Dampak terhadap kesejahteraan: Masalah ini secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi,

kesehatan, pendidikan, dan sosial.

5. Keterjangkauan solusi: Penyelesaian masalah ini harus realistis, dapat diterapkan, dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Penentuan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Rumusan isu strategis mempertimbangkan potensi daerah yang menjadi kewenangan, permasalahan, isu KLHS yang relevan, dan isu lingkungan dinamis yang relevan meliputi isu global, isu nasional dan isu regional. Rumusan permasalahan dan isu strategis digambarkan dengan singkat dalam tabel II.9.

Tabel II.9.
Permasalahan Dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Pengembangan sumber daya alam dan ekonomi lokal	Masih banyak kasus kekerasan fisik, seksual, ABH dan psikologis terhadap perempuan dan anak. Rendahnya pelaporan dan penanganan kasus karena norma sosial dan keterbatasan layanan.	Berdasarkan hasil analisis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terdapat empat isu strategis yang menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas ke depan. Isu-isu tersebut meliputi: pertama, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang efektif;	Perempuan dan anak-anak lebih rentan terdampak bencana alam dan perubahan iklim karena akses terbatas terhadap sumber daya, perlindungan hukum, dan layanan kesehatan.	Di daerah pesisir atau rawan longsor/bencana, perempuan sering terbebani tugas domestik ganda dan kehilangan akses ekonomi saat lingkungan rusak.	Pemerintah daerah belum memiliki data lingkungan yang terpilah menurut gender dan usia anak.	Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta terbatasnya akses layanan perlindungan.
	Perempuan masih menghadapi hambatan dalam pendidikan, pekerjaan layak, kewirausahaan, dan kepemimpinan. Kesenjangan Indeks Pembangunan		Anak-anak di wilayah rawan bencana rentan dieksploitasi atau menjadi korban perdagangan manusia. Bencana lingkungan	Kurangnya sistem perlindungan anak saat terjadi bencana (misalnya shelter aman, layanan trauma healing). Masih minimnya SOP pengungsian	Perempuan belum dilibatkan maksimal dalam penyusunan rencana kontinjensi bencana atau perencanaan tata ruang. Beberapa	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih terjadi	kedua, peningkatan dan penguatan ekonomi daerah untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif; ketiga, pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan; dan keempat, tata kelola perkotaan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	menyebabkan putus sekolah dan peningkatan pekerja anak.	yang ramah perempuan dan anak. UU Perlindungan Anak No. 35/2014.	daerah mulai menerapkan desa tangguh bencana berbasis gender dan anak.	
	Masih tingginya praktik perkawinan usia dini		UN Women dan UNICEF mendorong integrasi isu gender dan anak dalam kebijakan iklim.	Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam adaptasi perubahan iklim.		Perkawinan Anak
	Keterwakilan perempuan di legislatif, eksekutif, dan jabatan struktural masih di bawah target 30%.		Agenda SDGs: Tujuan 5 (Kesetaraan Gender) dan Tujuan 13 (Aksi Iklim) saling terhubung.			Rendahnya Representasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
	Adanya anak mengalami pola asuh negatif (keras, otoriter, atau permisif) karena minimnya pengetahuan orang tua.					Rendahnya Kualitas Pengasuhan Anak
	Minimnya mekanisme perlindungan anak dalam sistem peradilan (keadilan restoratif belum					Tingginya Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	merata).					
	Belum memiliki rumah aman dan SDM terlatih dalam penanganan korban. Terbatasnya anggaran dan kapasitas layanan.					Ketimpangan Akses Layanan Perlindungan dan Rehabilitasi
	Belum menyusun data terpilah, GBS (gender budget statement). KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) belum merata penerapannya.					Masih Rendahnya Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Hak Anak
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	Masih banyak pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tapi tidak menggunakan	Berdasarkan hasil analisis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terdapat empat isu strategis	Ledakan populasi mempercepat kerusakan lingkungan: deforestasi, limbah domestik, polusi udara.	Kota-kota besar mengalami tekanan lingkungan akibat lonjakan penduduk: banjir, sampah,	Daerah padat penduduk mengalami konversi lahan hijau menjadi permukiman, berisiko	Tingginya Angka Kelahiran yang Tidak Diinginkan (Unmet Need)

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	alat/cara kontrasepsi, terutama terjadi pada remaja, kelompok miskin, dan wilayah terpencil.	yang menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas ke depan. Isu-isu tersebut meliputi:	Keluarga besar di negara miskin sulit mengakses sanitasi, energi bersih, dan air bersih. Konsentrasi populasi di daerah urban memicu slum, kekurangan ruang hijau, dan polusi. UNFPA (United Nations Population Fund) mendorong integrasi pengendalian penduduk dalam kebijakan iklim dan pembangunan berkelanjutan.	kemacetan. Program KB penting untuk membangun keluarga kecil berkualitas yang sadar lingkungan. Penduduk miskin rentan terdampak krisis lingkungan karena tinggal di zona rawan (bantaran sungai, pinggir laut, lereng bukit). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengaitkan KB	longsor dan banjir. Perluasan edukasi KB dan kependudukan di level keluarga & masyarakat, termasuk dampak lingkungan dari jumlah anak berlebih. Program lintas dinas: KB, LH, Bappeda bersama penyusunan peta kepadatan penduduk berbasis risiko lingkungan.	
	Masih dominannya metode kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik).	pertama, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang efektif;				Rendahnya Penggunaan dan Keberlangsungan Kontrasepsi Modern
	Rendahnya pemakaian metode jangka panjang (IUD, implan) karena akses, edukasi, atau stigma.	kedua, peningkatan dan penguatan ekonomi daerah untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif;				
	Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) masih sulit dijangkau pelayanan KB berkualitas. Kekurangan tenaga lini lapangan (PKB/PLKB) dan fasilitas.	ketiga, pengelolaan				Kurangnya Akses dan Kualitas Layanan KB di Daerah Tertinggal dan Kepulauan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
		ekosistem yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan; dan keempat, tata kelola perkotaan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.		dengan pembangunan berkelanjutan. Program “Bangga Kencana” (BKKBN) kini mengintegrasikan isu lingkungan dan ketahanan keluarga.		
	Banyak remaja menikah muda atau mengalami kehamilan di luar nikah. Rendahnya edukasi kesehatan reproduksi dan akses terhadap informasi seksual yang benar.					Tingginya Angka Kehamilan Remaja
	Program KB masih dianggap tanggung jawab perempuan. Penggunaan kondom dan MOP (vasektomi) sangat rendah.					Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Laki-Laki dalam KB
	Ketimpangan beban pembangunan dan pelayanan dasar.					Pertumbuhan Penduduk Tidak Merata
	Tantangan dalam memanfaatkan bonus demografi menjadi daya saing					Kualitas Penduduk Belum Optimal

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	SDM.					
	Data keluarga (by name by address) sudah tersedia lewat aplikasi <i>New Siga</i> , tapi belum sepenuhnya digunakan untuk perencanaan berbasis data di daerah. Pemda memanfaatkan <i>dashboard</i> penduduk secara strategis.					Belum Optimalnya Pengelolaan Data dan Pemanfaatan Basis Data Keluarga
	Program pengendalian penduduk membutuhkan sinergi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi), tapi implementasi sering terfragmentasi.					Belum Optimalnya Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengendalian Penduduk

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Sasaran RPJMD tahun 2025-2029 dan urusan wajib yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi PD. Sasaran renstra merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Tabel III.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran

NSK dan Asta Cita	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak - Penduduk Tumbuh Seimbang dan meningkatnya keluarga berkualitas	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas		1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,39	89,29	90,19	91,09	92,34	92,34
			2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,414	0,409	0,404	0,399	0,394	0,394
			3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	56,3	61,05	65,8	70,55	75,29	75,29
			4. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	65,95	66,11	66,27	66,43	66,59	66,75
		1. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)	300 poin	350 poin	400 poin	450 poin	500 poin	550 poin
			2. Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	600 poin	625 poin	650 poin	675 poin	700 poin	725 poin
		2. Meningkatnya pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga	1. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	57,81	59,81	61,81	63,81	65,81	67,81
			2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,24	62,16	65,07	67,99	70,9	73,82

3.2 Strategi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan tentang cara atau pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dimana akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas periode tahun 2025–2029. Strategi diuraikan mencakup tahapan, lokasi fokus (lokus) dan penetapan program/kegiatan/subkegiatan dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Renstra PD dipetakan menurut urusan yang menjadi tanggung jawab PD, yaitu:

A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Strategi peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Berikut adalah strategi-strategi utama yang akan diterapkan: Peningkatan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan; Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan; Kepemimpinan dan Partisipasi Politik; Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan; Penegakan Hukum dan Layanan Korban; Pemenuhan Hak Anak; Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi; Penguatan Sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); Penguatan Kelembagaan dan Regulasi; Peran Serta Masyarakat dan Media.

B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Strategi peningkatan pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan nasional memperhatikan aspek jumlah, struktur, distribusi, dan kualitas penduduk, serta memperkuat peran keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Berikut adalah strategi utamanya yang akan digunakan dalam konteks kebijakan publik, pembangunan daerah, maupun perencanaan sosial: Mengarusutamakan isu kependudukan (jumlah, komposisi, persebaran) dalam RPJMN, RPJMD, dan rencana sektoral; Penguatan basis data kependudukan melalui integrasi data BKKBN, Dukcapil, dan BPS; Meningkatkan akses dan kualitas layanan Keluarga Berencana (KB) modern; Kampanye penundaan usia perkawinan dan penguatan regulasi cegah pernikahan anak; Edukasi reproduksi dan kesehatan seksual berbasis komunitas dan sekolah; Penguatan 8 fungsi keluarga: agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan; Pengembangan program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia; Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendidikan parenting, konseling keluarga, dan penguatan ekonomi keluarga; dan Edukasi publik (toko masyarakat, toko agama, toko adat, sektor swasta dan dunia usaha) tentang pentingnya kependudukan dan peran keluarga dalam pembangunan.

Penahapan dilakukan agar pelaksanaan lebih terstruktur, terkendali, dan efektif sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia (anggaran, SDM, waktu), skala prioritas, dan kompleksitas program atau wilayah yang dituju. Penahapan Renstra PD tertuang dalam tabel III.2 yang telah di sinergiskan dengan penahapan RPJMD.

Tabel III.2
Penahapan Renstra PD

TAHAP I Tahun 2026	TAHAP II Tahun 2027	TAHAP III Tahun 2028	TAHAP IV Tahun 2029	TAHAP V Tahun 20230
Penguatan Modal Dasar Pembangunan meliputi; • Pengembangan SDM daerah • Pemenuhan sarana dan prasarana dasar	Akselerasi Pembangunan Daerah meliputi: • Penguatan tata kelola, layanan publik	Perluasan Aktivitas Pembangunan Daerah meliputi: • Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Pemantapan Capaian Pembangunan meliputi: • Tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif	Kesejahteraan Merata dan Berkeadilan meliputi: • Peningkatan ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga secara menyeluruh dan berkelanjutan • Perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan

Penetapan lokasi fokus adalah proses menentukan wilayah atau daerah tertentu sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program/kegiatan agar intensifitas pelaksanaan program/kegiatan dapat lebih efektif dan efisien. Penahapan Renstra PD tertuang dalam tabel III.3.

Tabel III.3
Lokus Renstra PD

No	Kriteria	Lokasi Fokus
1.	Akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan dan ekonomi	Wilayah Kecamatan/desa dengan ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki tertinggi
2.	Persentase atau jumlah kasus kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran anak	Wilayah Kecamatan/desa dengan persentase atau jumlah terbanyak
3.	Keluarga dengan dimensi: keutuhan, kemandirian, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak	Wilayah Kecamatan/desa dengan nilai dimensi terendah
4.	Ketersediaan dan berfungsinya struktur, regulasi, dan SDM PUG termasuk penggunaan data terpilah dan analisis gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program	Instansi, perangkat daerah, dan atau lembaga lainnya dengan dukungan terhadap nilai evaluasi APE terendah
5.	Variabel evaluasi penilaian KLA	Instansi, perangkat daerah, dan atau lembaga lainnya dengan dukungan terhadap nilai evaluasi KLA terendah
6.	Keintegrasian isu kependudukan dalam	Instansi dan perangkat daerah yang

No	Kriteria	Lokasi Fokus
	dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan	belum sepenuhnya sepenuhnya mengintegrasikan isu kependudukan dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan
7.	Indeks Ketentraman, Indeks Kemandirian, Indeks Kebahagiaan dalam keluarga	Wilayah kecamatan/desa dengan kontribusi terendah dalam pencapaian iBangga
8.	Keluarga berisiko <i>stunting</i> (KRS)	Wilayah kecamatan/desa dengan KRS tertinggi

Arah kebijakan Renstra PD adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Renstra PD dapat dilihat pada tabel III.4

Tabel III.4
Arah Kebijakan Renstra PD

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat berintelektual tinggi, berdaya saing dan kompetitif siap kerja, penguatan literasi, sains, teknologi, disertai meningkatnya prestasi olahraga, kesetaraan gender, peran anak dan perempuan, pemuda serta penyandang disabilitas dalam pembangunan	✓ Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan ✓ Meningkatkan kualitas keluarga ✓ Meningkatkan perlindungan terhadap anak ✓ Meningkatkan pengendalian penduduk	A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Terwujudnya pelembagaan pengarusutamaan gender yang efektif dan berkelanjutan pada lembaga pemerintah di tingkat kabupaten/kota 2. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi melalui penguatan organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota. 3. Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan jangkauan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan di tingkat daerah Kabupaten/Kota 4. Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara sistematis, terkoordinasi, dan berbasis masyarakat di tingkat kabupaten/kota 5. Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 6. Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan jangkauan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan di tingkat daerah Kabupaten/Kota 7. Meningkatnya kualitas keluarga yang responsif	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			gender dan ramah anak dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak di tingkat Kabupaten/Kota 8. Meningkatnya kapasitas dan kualitas lembaga penyedia layanan keluarga dan anak yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan keluarga serta pemenuhan hak anak 9. Meningkatkan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak 10. Tersedianya data dukung profil gender dan anak 11. Tersedianya Lembaga PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 12. Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 13. Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 14. Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15. Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1. Meningkatnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Meningkatnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 3. Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lok 4. Meningkatnya pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 5. Meningkatkan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 6. Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 7. Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 8. Meningkatkan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program/kegiatan/subkegiatan disusun dengan memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta surat keputusan kementerian dalam negeri terkait pemutakhiran nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan yang telah beberapa kali diubah. Indikator Kinerja Kunci (IKU) Renstra PD, indikator sasaran Renstra PD dan indikator Kinerja Kunci (IKK)/Indikator program yang digunakan sebagian besar bersumber dari Kepmen PPN/Kepala BAPPENAS nomor KEP.26S/M.PPN/HK/05/2025 tentang kode Referensi Indikator Pembangunan yang telah disesuaikan dengan indikator pembangunan yang tersedia dalam aplikasi SIPD-RI. Sedangkan Indikator kegiatan, selain menggunakan Kepmen di atas juga merupakan hasil rumusan yang ditetapkan oleh Kepala PD sesuai dengan hasil analisis data yang ada. Sementara indikator subkegiatan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pemutakhiran nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan. Target indikator disusun dengan memperhatikan target nasional dan kondisi data capaian pada awal tahun perencanaan (baseline). Pagu indikatif yang disusun merupakan hasil perhitungan analisis proporsional atas pagu indikatif renstra sebelumnya dan pagu definitif DPA tahun sebelumnya disesuaikan dengan batasan pagu Renstra PD tahun 2026-2029 yang telah ditetapkan oleh TAPD. Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan hasil dari rakortek tingkat provinsi bersama Bappeda Provinsi Kalbar.

Rangkaian proses penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan urusan disederhanakan dalam bentuk tabel yang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025. Adapun tabel dimaksud yaitu: rumusan program/kegiatan/subkegiatan; rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan; daftar subkegiatan prioritas

dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah; Indikator Kinerja Utama (IKU); Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sebagai tabel pelengkap telah ditambahkan tabel terkait definisi operasional dan rumus dari masing-masing IKU dan IKK.

Tabel IV.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S2.1.6 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak S2.1.7 Penduduk Tumbuh Seimbang dan meningkatnya keluarga berkualitas	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas				1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 3. Indeks Perlindungan Anak (IPA) 4. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)		
		S.1.Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak			1. Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE) 2. Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				Terwujudnya pelembagaan pengarusutamaan gender yang efektif dan berkelanjutan pada lembaga pemerintah di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki focal point atau tim PUG aktif	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	2.08.02.2.01.0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
						(7)	(8)
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
				terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya kapasitas dan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi melalui penguatan organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah organisasi kemasyarakatan perempuan yang menerima program penguatan kapasitas di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	2.08.02.2.02.0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	2.08.02.2.02.0006	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.0007	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan jangkauan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang memperoleh penguatan kapasitas	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
				terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
				terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	2.08.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	2.08.02.2.03.0011	mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meni
				Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
				Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara sistematis, terkoordinasi, dan berbasis masyarakat di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kader, fasilitator, atau relawan masyarakat yang diedukasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	2.08.03.2.01.0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	2.08.03.2.01.0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan yang diberikan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				& Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota &	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0003	& layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota &

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan jangkauan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memperoleh penguatan kapasitas	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi	2.08.03.2.03.0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	2.08.03.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	1. Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar 2. Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan puspaga	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas keluarga yang responsif gender dan ramah anak dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan edukasi tentang kesetaraan gender dan hak anak	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya kapasitas dan kualitas lembaga penyedia layanan keluarga dan anak yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan keluarga serta pemenuhan hak	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga dan anak yang memperoleh peningkatan kapasitas	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				anak			
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kabupaten/Kota			
				Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatkan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Jenis layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota
				Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
				Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan PA Lingkup Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota
				Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
				Tersedianya data dukung profil gender dan anak	Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak
				Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	2.08.05.2.01.0005	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA
				Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
				Tersedianya Lembaga PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PHA yang terbentuk	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif 3. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
				Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	2.08.07.2.01.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	2.08.07.2.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	2.08.07.2.01.0011	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan yang diberikan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tingkat Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota
				Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kabupaten/Kota			
				Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota
				terlaksananya koordinasi dan	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota		penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota
				terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai
				terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2.08.07.2.03.0014	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		S.2. Meningkatnya pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga			1. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) 2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Peningkatan pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga	Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total Total Fertility finte/ TFR) 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific NertiliJ State/ASFR 15-19 3. Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
				Meningkatnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penduduk			
				Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
				Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
				Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
				Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal
				Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	2.14.02.2.01.0028	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
						(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	2.14.02.2.01.0029	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	2.14.02.2.01.0030	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	2.14.02.2.01.0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	2.14.02.2.01.0032	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	2.14.02.2.01.0033	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	2.14.02.2.01.0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah
				Meningkatnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Cakupan Rumah Data Kependudukan yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan Kampung KB	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
				Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
				Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
				Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
				Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana
				Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	2.14.02.2.02.0022	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	2.14.02.2.02.0024	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
				Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	2.14.02.2.02.0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB
				Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
				Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	2.14.02.2.02.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) 2. Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) 3. Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lok	Jumlah Kecamatan yang mendukung program Bangga Kencana	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
				Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana
				Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
				Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Media Luar Ruang			
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
				Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
				Meningkatnya pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB yang berkinerja baik	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
				Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
				Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
				Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(PKB/PLKB)			
				Meningkatkan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Alat dan Obat Kontrasepsi MKJP Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
				Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
				Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
				Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
				Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
				Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan
				Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan
				Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase peserta KB baru	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung	Jumlah DASHAT di Kampung KB	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Keluarga Berkualitas			Berkualitas
				Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
				Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga 2. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja 3. Indeks Lansia Berdaya 4. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri 5. Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting 6. Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL. UPPKS, PIK R) yang di bina	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
				Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
				Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Akseptor (UPPKA)			
				Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
				Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				)			(UPPKA)
				Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
				Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
				Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	2.14.04.2.01.0029	Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatkan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan PUS peserta KB Kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R)	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
				Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga

Tabel IV.2
Rencana Program dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
		2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					7.532.678.487,38		8.662.580.262,06		9.788.715.694,69		10.669.700.108,24		11.736.670.118,77
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.184.216.438,38		4.811.848.904,06		5.437.389.261,69		5.926.754.295,24		6.519.429.724,77
meningkatkan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.184.216.438,38	100	4.811.848.904,06	100	5.437.389.261,69	100	5.926.754.295,24	100	6.519.429.724,77
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					784.795.793,00		902.515.162,00		1.019.842.133,00		1.111.627.925,00		1.222.790.717,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
		2023	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	-	4	5	784.795.793,00	6	902.515.162,00	7	1.019.842.133,00	8	1.111.627.925,00	9	1.222.790.717,00
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	59,91	73,03	73,28		73,53		73,78		74,03		74,28	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					523.197.195,00		601.676.775,00		679.894.755,00		741.085.283,00		815.193.812,00
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	523.197.195,00	100	601.676.775,00	100	679.894.755,00	100	741.085.283,00	100	815.193.812,00
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					732.476.073,00		842.347.484,00		951.852.657,00		1.037.519.397,00		1.141.271.336,00
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	1. Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	na	na	5%	732.476.073,00	10%	842.347.484,00	15%	951.852.657,00	20%	1.037.519.397,00	25%	1.141.271.336,00
	2. Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan puspaga (Keluarga)	na	100	110		120		130		140		150	
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN					156.959.159,00		180.503.032,00		203.968.427,00		222.325.585,00		244.558.143,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
		2023	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK													
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	-	50	55	156.959.159,00	60	180.503.032,00	65	203.968.427,00	70	222.325.585,00	75	244.558.143,00
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					627.836.634,00		722.012.130,00		815.873.706,00		889.302.340,00		978.232.574,00
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	56,07	58,06	61,76	627.836.634,00	65,46	722.012.130,00	69,16	815.873.706,00	72,91	889.302.340,00	72,91	978.232.574,00
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					523.197.195,00		601.676.775,00		679.894.755,00		741.085.283,00		815.193.812,00
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	-	62,29	68,29	523.197.195,00	74,29	601.676.775,00	80,29	679.894.755,00	86,44	741.085.283,00	86,44	815.193.812,00
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
		2023	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.115.481.856,00		8.182.804.135,00		9.246.568.672,00		10.078.759.852,00		11.086.635.838,00
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.883.509.903,00		2.166.036.389,00		2.447.621.119,00		2.667.907.020,00		2.934.697.722,00
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	32,3	32,3	28,68	1.883.509.903,00	25,05	2.166.036.389,00	21,43	2.447.621.119,00	17,80	2.667.907.020,00	14,18	2.934.697.722,00
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	-	85,2	85,8		86,4		87		87,7		87,7	
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,44	2,44	2,33		2,22		2,11		2,00		1,89	
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.151.033.830,00		1.323.688.904,00		1.495.768.462,00		1.630.387.623,00		1.793.426.386,00
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	59,2	61,8	61,9	1.151.033.830,00	62	1.323.688.904,00	62,1	1.495.768.462,00	62,2	1.630.387.623,00	62,2	1.793.426.386,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
		2023	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9,6	10,5	10		9,5		9		8,5		8	
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	11,2	11,2	11		10,8		10,6		10,4		10,2	
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					4.080.938.123,00		4.693.078.842,00		5.303.179.091,00		5.780.465.209,00		6.358.511.730,00
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	55,3	56,6	58	4.080.938.123,00	59,3	4.693.078.842,00	60,8	5.303.179.091,00	62,2	5.780.465.209,00	63,7	6.358.511.730,00
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	81,6	82,7	83,6		84,9		86		87,1		88,2	
	Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) (%)	93,91	90	90		90		90		90		90	
	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting (%)	83,90	90	90		90		90		90		90	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
		2023	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	20,3	21,4	22,6		23,9		25,2		26,6		28,1	
	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	76	76	78		80		82		84		86	
TOTAL KESELURUHAN					14.648.160.343,38		16.845.384.397,06		19.035.284.366,69		20.748.459.960,24		22.823.305.956,77

Tabel IV.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.08- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
2.08.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas	100%	100%	4.484.216.438,40	1,00	4.811.848.904,16	1,00	5.437.389.261,70	1,00	5.926.754.295,25	1,00	6.519.429.724,78
2.08.01.2.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	15.412.692,00	1,00	17.724.598,00	1,00	20.028.798,00	1,00	21.831.390,00	1,00	24.014.526,00
2.08.01.2.01.0001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	2.070.953,00	1 dokumen	2.381.596,00	1 dokumen	2.691.204,00	1 dokumen	2.933.412,00	1 dokumen	3.226.753,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.01.2.01.0002- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.190.453,00	1 dokumen	2.519.022,00	1 dokumen	2.846.494,00	1 dokumen	3.102.679,00	1 dokumen	3.412.947,00
2.08.01.2.01.0003- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.190.431,00	1 dokumen	2.518.996,00	1 dokumen	2.846.466,00	1 dokumen	3.102.648,00	1 dokumen	3.412.912,00
2.08.01.2.01.0004- Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.190.431,00	1 dokumen	2.518.996,00	1 dokumen	2.846.466,00	1 dokumen	3.102.648,00	1 dokumen	3.412.912,00
2.08.01.2.01.0005- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.190.431,00	1 dokumen	2.518.996,00	1 dokumen	2.846.466,00	1 dokumen	3.102.648,00	1 dokumen	3.412.912,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.01.2.01.0006- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.389.562,00	1 Laporan	2.747.996,00	1 Laporan	3.105.236,00	1 Laporan	3.384.707,00	1 Laporan	3.723.178,00
2.08.01.2.01.0007- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.190.431,00	1 Laporan	2.518.996,00	1 Laporan	2.846.466,00	1 Laporan	3.102.648,00	1 Laporan	3.412.912,00
2.08.01.2.02- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.499.318.373,48	1,00	3.679.216.133,80	1,00	4.157.514.228,59	1,00	4.531.690.511,67	1,00	4.984.859.563,14
2.08.01.2.02.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bula n	26 Orang/bul an	3.420.861.075,48	28 Orang/bul an	3.588.990.236,80	29 Orang/bul an	4.055.558.967,59	30 Orang/bul an	4.420.559.274,67	32 Orang/bul an	4.862.615.202,14
2.08.01.2.02.0002- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	23.895.625,00	1 Dokumen	27.479.969,00	1 Dokumen	31.052.365,00	1 Dokumen	33.847.078,00	1 Dokumen	37.231.786,00
2.08.01.2.02.0003- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	44.605.168,00	1 Dokumen	51.295.943,00	1 Dokumen	57.964.416,00	1 Dokumen	63.181.214,00	1 Dokumen	69.499.335,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.01.2.02.0004-Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.991.301,00	1 Dokumen	2.289.997,00	1 Dokumen	2.587.696,00	1 Dokumen	2.820.589,00	1 Dokumen	3.102.648,00
2.08.01.2.02.0005-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.991.301,00	1 Laporan	2.289.997,00	1 Laporan	2.587.696,00	1 Laporan	2.820.589,00	1 Laporan	3.102.648,00
2.08.01.2.02.0006-Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.991.301,00	1 Dokumen	2.289.997,00	1 Dokumen	2.587.696,00	1 Dokumen	2.820.589,00	1 Dokumen	3.102.648,00
2.08.01.2.02.0007-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.991.301,00	1 Laporan	2.289.997,00	1 Laporan	2.587.696,00	1 Laporan	2.820.589,00	1 Laporan	3.102.648,00
2.08.01.2.02.0008-Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.991.301,00	1 Dokumen	2.289.997,00	1 Dokumen	2.587.696,00	1 Dokumen	2.820.589,00	1 Dokumen	3.102.648,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.01.2.03- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	23.497.358,00	1,00	27.021.964,00	1,00	30.534.819,00	1,00	33.282.954,00	1,00	36.611.248,00
2.08.01.2.03.0001- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.991.301,00	1 Dokumen	2.289.997,00	1 Dokumen	2.587.696,00	1 Dokumen	2.820.589,00	1 Dokumen	3.102.648,00
2.08.01.2.03.0002- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.982.604,00	1 Dokumen	4.579.994,00	1 Dokumen	5.175.394,00	1 Dokumen	5.641.179,00	1 Dokumen	6.205.297,00
2.08.01.2.03.0003- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.190.431,00	1 Laporan	2.518.996,00	1 Laporan	2.846.466,00	1 Laporan	3.102.648,00	1 Laporan	3.412.912,00
2.08.01.2.03.0004- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.588.692,00	1 Laporan	2.976.996,00	1 Laporan	3.364.005,00	1 Laporan	3.666.766,00	1 Laporan	4.033.442,00
2.08.01.2.03.0005- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.991.301,00	1 Laporan	2.289.997,00	1 Laporan	2.587.696,00	1 Laporan	2.820.589,00	1 Laporan	3.102.648,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.01.2.03.0006- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.779.124,00	1 Laporan	5.495.993,00	1 Laporan	6.210.472,00	1 Laporan	6.769.415,00	1 Laporan	7.446.356,00
2.08.01.2.03.0007- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.973.905,00	1 Dokumen	6.869.991,00	1 Dokumen	7.763.090,00	1 Dokumen	8.461.768,00	1 Dokumen	9.307.945,00
2.08.01.2.05- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	33.852.133,00	1,00	38.929.952,00	1,00	43.990.848,00	1,00	47.950.024,00	1,00	52.745.027,00
2.08.01.2.05.0001- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 unit	5 unit	7.965.208,00	5 unit	9.159.989,00	5 unit	10.350.788,00	5 unit	11.282.359,00	5 unit	12.410.595,00
2.08.01.2.05.0003- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	3.982.604,00	1 Dokumen	4.579.994,00	1 Dokumen	5.175.394,00	1 Dokumen	5.641.179,00	1 Dokumen	6.205.297,00
2.08.01.2.05.0004- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	5.973.905,00	1 Dokumen	6.869.991,00	1 Dokumen	7.763.090,00	1 Dokumen	8.461.768,00	1 Dokumen	9.307.945,00
2.08.01.2.05.0005- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	7.965.208,00	1 Dokumen	9.159.989,00	1 Dokumen	10.350.788,00	1 Dokumen	11.282.359,00	1 Dokumen	12.410.595,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.01.2.05.0011- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1 orang	1 orang	7.965.208,00	1 orang	9.159.989,00	1 orang	10.350.788,00	1 orang	11.282.359,00	1 orang	12.410.595,00
2.08.01.2.06- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	183.518.401,00	1,00	211.046.163,00	1,00	238.482.164,00	1,00	259.945.559,00	1,00	285.940.117,00
2.08.01.2.06.0001- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	27.878.229,00	1 paket	32.059.964,00	1 paket	36.227.759,00	1 paket	39.488.258,00	1 paket	43.437.084,00
2.08.01.2.06.0002- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 paket	27 paket	19.913.021,00	28 paket	22.899.974,00	29 paket	25.876.971,00	30 paket	28.205.898,00	31 paket	31.026.488,00
2.08.01.2.06.0003- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	22 paket	21.904.323,00	24 paket	25.189.971,00	25 paket	28.464.668,00	26 paket	31.026.488,00	28 paket	34.129.137,00
2.08.01.2.06.0004- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 paket	27 paket	31.860.834,00	27 paket	36.639.960,00	27 paket	41.403.154,00	27 paket	45.129.438,00	27 paket	49.642.382,00
2.08.01.2.06.0005- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	25 Paket	35.843.438,00	26 Paket	41.219.954,00	27 Paket	46.578.548,00	28 Paket	50.770.618,00	29 Paket	55.847.680,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.01.2.06.0006- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.301.212,00	1 Dokumen	4.946.394,00	1 Dokumen	5.589.425,00	1 Dokumen	6.092.473,00	1 Dokumen	6.701.721,00
2.08.01.2.06.0008- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	1.991.301,00	-	2.289.997,00	-	2.587.696,00	-	2.820.589,00	-	3.102.648,00
2.08.01.2.06.0009- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	48 Laporan	39.826.043,00	52 Laporan	45.799.949,00	53 Laporan	51.753.943,00	55 Laporan	56.411.797,00	57 Laporan	62.052.977,00
2.08.01.2.07- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	316.617.039,00	1,00	364.109.597,00	1,00	411.443.846,00	1,00	448.473.790,00	1,00	493.321.171,00
2.08.01.2.07.0001- Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	79.652.086,00	1 unit	91.599.900,00	1 unit	103.507.887,00	1 unit	112.823.596,00	1 unit	124.105.956,00
2.08.01.2.07.0002- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	2 unit	9.956.510,00	2 unit	11.449.987,00	2 unit	12.938.485,00	2 unit	14.102.949,00	2 unit	15.513.244,00
2.08.01.2.07.0005- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	3 unit	7.965.208,00	5 unit	9.159.989,00	6 unit	10.350.788,00	8 unit	11.282.359,00	10 unit	12.410.595,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.01.2.07.0006- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	7.965.208,00	1 unit	9.159.989,00	1 unit	10.350.788,00	1 unit	11.282.359,00	1 unit	12.410.595,00
2.08.01.2.07.0007- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	79.652.086,00	1 unit	91.599.900,00	1 unit	103.507.887,00	1 unit	112.823.596,00	1 unit	124.105.956,00
2.08.01.2.07.0009- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	99.565.108,00	1 unit	114.499.874,00	1 unit	129.384.858,00	1 unit	141.029.495,00	1 unit	155.132.445,00
2.08.01.2.07.0010- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	19.913.021,00	1 unit	22.899.974,00	1 unit	25.876.971,00	1 unit	28.205.898,00	1 unit	31.026.488,00
2.08.01.2.07.0011- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	11.947.812,00	1 unit	13.739.984,00	1 unit	15.526.182,00	1 unit	16.923.538,00	1 unit	18.615.892,00
2.08.01.2.08- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	272.211.004,00	1,00	313.042.656,00	1,00	353.738.201,00	1,00	385.574.640,00	1,00	424.132.103,00
2.08.01.2.08.0001- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.190.431,00	1 Laporan	2.518.996,00	1 Laporan	2.846.466,00	1 Laporan	3.102.648,00	1 Laporan	3.412.912,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.01.2.08.0002- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	29.869.532,00	1 Laporan	34.349.962,00	1 Laporan	38.815.457,00	1 Laporan	42.308.848,00	1 Laporan	46.539.733,00
2.08.01.2.08.0003- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	17.125.198,00	1 laporan	19.693.978,00	1 laporan	22.254.195,00	1 laporan	24.257.073,00	1 laporan	26.682.780,00
2.08.01.2.08.0004- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	223.025.843,00	1 Laporan	256.479.720,00	1 Laporan	289.822.083,00	1 Laporan	315.906.071,00	1 Laporan	347.496.678,00
2.08.01.2.09- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	118.681.601,00	1,00	136.483.843,00	1,00	154.226.743,00	1,00	168.107.149,00	1,00	184.917.865,00
2.08.01.2.09.0001- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	6 unit	1.991.301,00	6 unit	2.289.997,00	6 unit	2.587.696,00	6 unit	2.820.589,00	6 unit	3.102.648,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.01.2.09.0002- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	5 unit	3.186.082,00	5 unit	3.663.995,00	5 unit	4.140.314,00	5 unit	4.512.943,00	5 unit	4.964.237,00
2.08.01.2.09.0005- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9 unit	12 unit	3.982.604,00	15 unit	4.579.994,00	18 unit	5.175.394,00	21 unit	5.641.179,00	24 unit	6.205.297,00
2.08.01.2.09.0006- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 unit	20 unit	11.947.812,00	20 unit	13.739.984,00	22 unit	15.526.182,00	24 unit	16.923.538,00	26 unit	18.615.892,00
2.08.01.2.09.0007- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	1 unit	1 unit	5.973.905,00	1 unit	6.869.991,00	1 unit	7.763.090,00	1 unit	8.461.768,00	1 unit	9.307.945,00
2.08.01.2.09.0009- Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	3 Unit	3 Unit	59.739.064,00	3 Unit	68.699.924,00	3 Unit	77.630.914,00	3 Unit	84.617.696,00	3 Unit	93.079.466,00
2.08.01.2.09.0010- Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	4 unit	4 unit	19.913.021,00	4 unit	22.899.974,00	4 unit	25.876.971,00	4 unit	28.205.898,00	4 unit	31.026.488,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.01.2.09.0011- Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	4 unit	4 unit	11.947.812,00	4 unit	13.739.984,00	4 unit	15.526.182,00	4 unit	16.923.538,00	4 unit	18.615.892,00
2.08.01.2.13- Penataan Organisasi	Persentase Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100%	100%	21.107.836,92	1,00	24.273.997,36	1,00	27.429.614,11	1,00	29.898.277,58	1,00	32.888.104,64
2.08.01.2.13.0004- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	2 dokumen	21.107.836,92	2 dokumen	24.273.997,36	2 dokumen	27.429.614,11	2 dokumen	29.898.277,58	2 dokumen	32.888.104,64
2.08- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3.348.462.049,00		3.850.731.358,00		4.351.326.433,00		4.742.945.813,00		5.217.240.394,00
2.08.02- PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	na	5%	784.795.793,00	6%	902.515.162,00	7%	1.019.842.133,00	8%	1.111.627.925,00	9%	1.222.790.717,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	59,91%	73,28%		73,53%		73,78%		74,03%		74,28%	
2.08.02.2.01- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki focal point atau tim PUG aktif	0	3	156.959.158,00	5	180.503.032,00	5	203.968.426,00	6	222.325.584,00	7	244.558.143,00
2.08.02.2.01.0001- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	2	18.835.100,00	2	21.660.363,00	2	24.476.211,00	2	26.679.071,00	2	29.346.977,00
2.08.02.2.01.0007- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1	1	17.265.507,00	1	19.855.334,00	1	22.436.527,00	1	24.455.814,00	1	26.901.396,00
2.08.02.2.01.0010- Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	0	1	25.113.465,00	1	28.880.485,00	1	32.634.948,00	1	35.572.093,00	1	39.129.303,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.02.2.01.0011- Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan	1	6	26.683.057,00	8	30.685.515,00	10	34.674.632,00	12	37.795.349,00	14	41.574.884,00
2.08.02.2.01.0012- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	23.543.874,00	1	27.075.455,00	1	30.595.264,00	1	33.348.838,00	1	36.683.721,00
2.08.02.2.01.0013- Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1	1	28.252.648,00	1	32.490.546,00	1	36.714.317,00	1	40.018.605,00	1	44.020.466,00
2.08.02.2.01.0014- Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	1	1	17.265.507,00	1	19.855.334,00	1	22.436.527,00	1	24.455.814,00	1	26.901.396,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.02.2.02- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan perempuan yang menerima program penguatan kapasitas di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	1	1	392.397.897,00	1	451.257.581,00	1	509.921.067,00	1	555.813.963,00	1	611.395.359,00
2.08.02.2.02.0003- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	0	2	43.163.769,00	2	49.638.333,00	2	56.091.318,00	2	61.139.536,00	2	67.253.489,00
2.08.02.2.02.0005- Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	1	1	51.011.727,00	1	58.663.486,00	1	66.289.739,00	1	72.255.815,00	1	79.481.397,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.02.2.02.0006- Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	3	4	62.783.664,00	5	72.201.213,00	6	81.587.371,00	7	88.930.234,00	8	97.823.257,00
2.08.02.2.02.0007- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	66.707.642,00	1	76.713.789,00	1	86.686.581,00	1	94.488.374,00	1	103.937.211,00
2.08.02.2.02.0008- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	200	350	78.479.579,00	400	90.251.516,00	450	101.984.213,00	500	111.162.793,00	550	122.279.072,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.02.2.02.0009- Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	200	300	90.251.516,00	350	103.789.244,00	400	117.281.845,00	450	127.837.211,00	500	140.620.933,00
2.08.02.2.03- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang memperoleh penguatan kapasitas	1	4	235.438.738,00	5	270.754.549,00	6	305.952.640,00	7	333.488.378,00	8	366.837.215,00
2.08.02.2.03.0007- pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	1	4	47.087.748,00	5	54.150.910,00	6	61.190.528,00	7	66.697.676,00	8	73.367.443,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.02.2.03.0008- penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1	1	42.378.973,00	1	48.735.819,00	1	55.071.475,00	1	60.027.908,00	1	66.030.699,00
2.08.02.2.03.0009- monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	49.442.135,00	1	56.858.455,00	1	64.250.054,00	1	70.032.559,00	1	77.035.815,00
2.08.02.2.03.0010- Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	0	1	51.796.522,00	1	59.566.001,00	1	67.309.581,00	1	73.367.443,00	1	80.704.187,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.02.2.03.0011- mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meni	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	0	1	44.733.360,00	1	51.443.364,00	1	58.131.002,00	1	63.362.792,00	1	69.699.071,00
2.08.03- PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	85%	523.197.195,00	85%	601.676.775,00	85%	679.894.755,00	85%	741.085.283,00	85%	815.193.812,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.03.2.01- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader, fasilitator, atau relawan masyarakat yang diedukasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	320	400	167.423.102,00	450	192.536.568,00	500	217.566.322,00	550	237.147.290,00	600	260.862.020,00
2.08.03.2.01.0003- monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	33.484.622,00	1	38.507.313,00	1	43.513.264,00	1	47.429.457,00	1	52.172.404,00
2.08.03.2.01.0004- Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	23.439.234,00	1	26.955.120,00	1	30.459.285,00	1	33.200.621,00	1	36.520.683,00
2.08.03.2.01.0005- Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	250	175	38.507.313,00	200	44.283.411,00	225	50.040.254,00	250	54.543.877,00	300	59.998.265,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.03.2.01.0006-Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1	1	36.833.082,00	1	42.358.045,00	1	47.864.591,00	1	52.172.404,00	1	57.389.644,00
2.08.03.2.01.0007-Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	0	1	35.158.851,00	1	40.432.679,00	1	45.688.928,00	1	49.800.931,00	1	54.781.024,00
2.08.03.2.02-Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan yang diberikan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kabupaten/Kota	2	1	251.134.654,00	1	288.804.852,00	1	326.349.482,00	1	355.720.936,00	1	391.293.030,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.03.2.02.0003- &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	7	3	35.158.852,00	3	40.432.679,00	2	45.688.927,00	2	49.800.932,00	2	54.781.024,00
2.08.03.2.02.0004- layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan TingkatKabupaten/Kota	1	1	37.670.198,00	1	43.320.728,00	1	48.952.422,00	1	53.358.140,00	1	58.693.955,00
2.08.03.2.02.0005- layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	7	3	30.136.158,00	3	34.656.582,00	2	39.161.938,00	2	42.686.512,00	2	46.955.164,00
2.08.03.2.02.0006- layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan	1	1	27.624.812,00	1	31.768.534,00	1	35.898.443,00	1	39.129.303,00	1	43.042.233,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Tingkat Kabupaten/Kota											
2.08.03.2.02.0007- layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	7	3	32.647.505,00	3	37.544.631,00	2	42.425.433,00	2	46.243.722,00	2	50.868.094,00
2.08.03.2.02.0008- Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	7	3	42.692.891,00	3	49.096.825,00	3	55.479.412,00	2	60.472.559,00	2	66.519.815,00
2.08.03.2.02.0009- Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	7	3	45.204.238,00	3	51.984.873,00	3	58.742.907,00	2	64.029.768,00	2	70.432.745,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.03.2.03- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memperoleh penguatan kapasitas	1	1	104.639.439,00	1	120.335.355,00	1	135.978.951,00	1	148.217.057,00	1	163.038.762,00
2.08.03.2.03.0005- Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1	1	12.556.733,00	1	14.440.243,00	1	16.317.474,00	1	17.786.046,00	1	19.564.652,00
2.08.03.2.03.0006- Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1	1	21.974.282,00	1	25.270.425,00	1	28.555.580,00	1	31.125.582,00	1	34.238.140,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.03.2.03.0007- pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	1	1	25.113.465,00	1	28.880.485,00	1	32.634.948,00	1	35.572.094,00	1	39.129.303,00
2.08.03.2.03.0008- Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	0	5	29.299.043,00	6	33.693.899,00	8	38.074.106,00	10	41.500.776,00	12	45.650.853,00
2.08.03.2.03.0009- Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1	1	15.695.916,00	1	18.050.303,00	1	20.396.843,00	1	22.232.559,00	1	24.455.814,00
2.08.04- PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1. Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	na	5%	732.476.073,00	10%	842.347.484,00	15%	951.852.657,00	20%	1.037.519.397,00	25%	1.141.271.336,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	2. Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan puspaga (Keluarga)	na	110		120		130		140		150	
2.08.04.2.01- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan edukasi tentang kesetaraan gender dan hak anak	5	5	344.263.754,00	5	395.903.318,00	5	447.370.748,00	5	487.634.117,00	5	536.397.528,00
2.08.04.2.01.0004- Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1	1	55.082.201,00	1	63.344.531,00	1	71.579.319,00	1	78.021.458,00	1	85.823.604,00
2.08.04.2.01.0005- Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	134.262.864,00	1	154.402.294,00	1	174.474.592,00	1	190.177.306,00	1	209.195.036,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.04.2.01.0006-Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	72.295.388,00	1	83.139.697,00	1	93.947.857,00	1	102.403.165,00	1	112.643.481,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.04.2.01.0007- monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	0	1	82.623.301,00	1	95.016.796,00	1	107.368.980,00	1	117.032.188,00	1	128.735.407,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.04.2.02- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga dan anak yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	1	227.067.583,00	1	261.127.720,00	1	295.074.324,00	1	321.631.013,00	1	353.794.114,00
2.08.04.2.02.0004- monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	52.225.545,00	1	60.059.376,00	1	67.867.094,00	1	73.975.133,00	1	81.372.647,00
2.08.04.2.02.0005- pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	1	1	36.330.813,00	1	41.780.435,00	1	47.211.892,00	1	51.460.962,00	1	56.607.058,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.04.2.02.0006- penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	38.601.489,00	1	44.391.712,00	1	50.162.635,00	1	54.677.272,00	1	60.144.999,00
2.08.04.2.02.0007- peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2	2	52.225.544,00	2	60.059.376,00	2	67.867.095,00	2	73.975.133,00	2	81.372.646,00
2.08.04.2.02.0008- Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	47.684.192,00	2	54.836.821,00	2	61.965.608,00	2	67.542.513,00	2	74.296.764,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.04.2.03- Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	0	3	161.144.736,00	3	185.316.446,00	3	209.407.585,00	3	228.254.267,00	3	251.079.694,00
2.08.04.2.03.0002- layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	0	2	32.228.947,00	3	37.063.288,00	4	41.881.517,00	5	45.650.854,00	6	50.215.938,00
2.08.04.2.03.0003- layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	0	1	30.617.500,00	1	35.210.125,00	1	39.787.441,00	1	43.368.311,00	1	47.705.142,00
2.08.04.2.03.0004- layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten /Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	1	1	37.063.289,00	1	42.622.783,00	1	48.163.745,00	1	52.498.481,00	1	57.748.330,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.04.2.03.0005- Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	0	1	27.394.605,00	1	31.503.796,00	1	35.599.289,00	1	38.803.225,00	1	42.683.548,00
2.08.04.2.03.0006- Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	0	1	33.840.395,00	1	38.916.454,00	1	43.975.593,00	1	47.933.396,00	1	52.726.736,00
2.08.05- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	na	55%	156.959.159,00	60%	180.503.032,00	65%	203.968.427,00	70%	222.325.585,00	75%	244.558.143,00
2.08.05.2.01- Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak	1	1	156.959.159,00	1	180.503.032,00	1	203.968.427,00	1	222.325.585,00	1	244.558.143,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.05.2.01.0003- Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1	53.366.114,00	1	61.371.031,00	1	69.349.266,00	1	75.590.699,00	1	83.149.769,00
2.08.05.2.01.0004- Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	0	1	54.935.706,00	1	63.176.061,00	1	71.388.949,00	1	77.813.955,00	1	85.595.350,00
2.08.05.2.01.0005- Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1	1	48.657.339,00	1	55.955.940,00	1	63.230.212,00	1	68.920.931,00	1	75.813.024,00
2.08.06- PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	na	61,76	627.836.634,00	65,46	722.012.130,00	69,16	815.873.706,00	72,91	889.302.340,00	72,91	978.232.574,00
2.08.06.2.01- Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PHA yang terbentuk	25	35	156.959.158,00	40	180.503.032,00	45	203.968.426,00	50	222.325.585,00	55	244.558.143,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.06.2.01.0003-Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	31	31	32.961.423,00	31	37.905.637,00	31	42.833.370,00	31	46.688.373,00	31	51.357.210,00
2.08.06.2.01.0004-Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	na	25	54.935.705,00	25	63.176.061,00	25	71.388.949,00	30	77.813.955,00	30	85.595.350,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.06.2.01.0005- Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	na	5	31.391.832,00	5	36.100.606,00	5	40.793.685,00	6	44.465.117,00	6	48.911.629,00
2.08.06.2.01.0006- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	37.670.198,00	1	43.320.728,00	1	48.952.422,00	1	53.358.140,00	1	58.693.954,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.06.2.02- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	2	2	470.877.476,00	2	541.509.098,00	3	611.905.280,00	3	666.976.755,00	3	733.674.431,00
2.08.06.2.02.0005- Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	30	50	141.263.244,00	50	162.452.728,00	70	183.571.584,00	70	200.093.027,00	100	220.102.329,00
2.08.06.2.02.0006- penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	3	70.631.621,00	3	81.226.365,00	3	91.785.792,00	4	100.046.513,00	4	110.051.165,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.06.2.02.0007-Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	6	42	75.340.396,00	50	86.641.456,00	60	97.904.845,00	70	106.716.281,00	80	117.387.909,00
2.08.06.2.02.0008-monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	89.466.720,00	1	102.886.729,00	1	116.262.003,00	1	126.725.583,00	1	139.398.142,00
2.08.06.2.02.0009-pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	12	17	94.175.495,00	22	108.301.820,00	27	122.381.056,00	32	133.395.351,00	37	146.734.886,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.07- PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	523.197.195,00	100%	601.676.775,00	100%	679.894.755,00	100%	741.085.283,00	100%	815.193.812,00
	2. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	3. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	na	68,29		74,29		80,29		86,44		86,44	
2.08.07.2.01- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	1	1	209.278.878,00	1	240.670.710,00	1	271.957.902,00	1	296.434.113,00	1	326.077.525,00
2.08.07.2.01.0006- koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2	2	31.391.832,00	2	36.100.607,00	2	40.793.686,00	3	44.465.116,00	3	48.911.628,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.07.2.01.0007-Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	0	2	27.206.254,00	2	31.287.192,00	2	35.354.527,00	3	38.536.435,00	3	42.390.078,00
2.08.07.2.01.0008-monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	0	1	29.299.043,00	1	33.693.899,00	1	38.074.106,00	1	41.500.776,00	1	45.650.854,00
2.08.07.2.01.0009-Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	7	10	25.113.465,00	10	28.880.485,00	12	32.634.948,00	15	35.572.094,00	15	39.129.303,00
2.08.07.2.01.0010-Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	80	80	41.855.776,00	80	48.134.142,00	120	54.391.580,00	120	59.286.823,00	160	65.215.505,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.07.2.01.0011- Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	1	1	54.412.508,00	1	62.574.385,00	1	70.709.055,00	1	77.072.869,00	1	84.780.157,00
2.08.07.2.02- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan yang diberikan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55	45	183.119.018,00	40	210.586.871,00	35	237.963.164,00	30	259.379.849,00	25	285.317.834,00
2.08.07.2.02.0008- Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	55	45	23.805.474,00	40	27.376.294,00	35	30.935.213,00	30	33.719.382,00	25	37.091.321,00
2.08.07.2.02.0009- layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	55	45	23.805.472,00	40	27.376.293,00	35	30.935.211,00	30	33.719.380,00	25	37.091.318,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.07.2.02.0010- layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	0	3	23.805.472,00	3	27.376.293,00	3	30.935.211,00	3	33.719.380,00	3	37.091.318,00
2.08.07.2.02.0011- layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2	2	23.805.472,00	1	27.376.293,00	1	30.935.211,00	1	33.719.380,00	1	37.091.318,00
2.08.07.2.02.0012- layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	0	1	18.311.902,00	1	21.058.687,00	1	23.796.316,00	1	25.937.985,00	1	28.531.783,00
2.08.07.2.02.0013- Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	55	45	23.805.472,00	40	27.376.293,00	35	30.935.211,00	30	33.719.380,00	25	37.091.318,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.07.2.02.0014- layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	2	23.805.472,00	2	27.376.293,00	2	30.935.211,00	2	33.719.380,00	2	37.091.318,00
2.08.07.2.02.0015- layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	55	45	21.974.282,00	40	25.270.425,00	35	28.555.580,00	30	31.125.582,00	25	34.238.140,00
2.08.07.2.03- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	12	17	130.799.299,00	22	150.419.194,00	27	169.973.689,00	32	185.271.321,00	37	203.798.453,00
2.08.07.2.03.0007- Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2	2	20.927.887,00	2	24.067.072,00	2	27.195.789,00	2	29.643.410,00	2	32.607.752,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.07.2.03.0009-koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1	1	17.003.909,00	1	19.554.495,00	1	22.096.580,00	1	24.085.272,00	1	26.493.799,00
2.08.07.2.03.0010-monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	19.619.895,00	1	22.562.879,00	1	25.496.053,00	1	27.790.698,00	1	30.569.768,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.07.2.03.0011-Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1	1	17.003.909,00	1	19.554.495,00	1	22.096.580,00	1	24.085.272,00	1	26.493.799,00
2.08.07.2.03.0012-penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	17.003.909,00	1	19.554.495,00	2	22.096.580,00	2	24.085.272,00	2	26.493.799,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.07.2.03.0013- Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	5	20	22.235.881,00	20	25.571.263,00	20	28.895.527,00	25	31.496.125,00	25	34.645.737,00
2.08.07.2.03.0014- pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2	2	17.003.909,00	2	19.554.495,00	2	22.096.580,00	2	24.085.272,00	2	26.493.799,00
2.14- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.115.481.856,00		8.182.804.135,00		9.246.568.672,00		10.078.759.852,00		11.086.635.838,00
2.14.02- PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Angka Kelahiran Total Total Fertility finte/ TFR)	2,44 jiwa	2,33 jiwa	1.883.509.903,00	2,22 jiwa	2.166.036.389,00	2,11 jiwa	2.447.621.119,00	2,00 jiwa	2.667.907.020,00	2,00 jiwa	2.934.697.722,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific NertiliJ State/ASFR 15-19	32,3 per 1000 wus 15-19 tahun	28,68 per 1000 wus 15-19 tahun		25,05 per 1000 wus 15-19 tahun		21,43 per 1000 wus 15-19 tahun		17,80 per 1000 wus 15-19 tahun		17,80 per 1000 wus 15-19 tahun	
	3. Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)	na	85,8%		86,4%		87%		87,7%		87,7%	
2.14.02.2.01- Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal	15 dokumen	19 dokumen	1.035.930.447,00	19 dokumen	1.191.320.014,00	19 dokumen	1.346.191.615,00	19 dokumen	1.467.348.861,00	19 dokumen	1.614.083.747,00
2.14.02.2.01.0016- Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	4 dokumen	5 dokumen	88.054.086,00	6 dokumen	101.262.203,00	7 dokumen	114.426.289,00	8 dokumen	124.724.653,00	9 dokumen	137.197.119,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.02.2.01.0017- Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	20 Laporan	20 Laporan	88.054.088,00	20 Laporan	101.262.201,00	20 Laporan	114.426.287,00	20 Laporan	124.724.653,00	20 Laporan	137.197.118,00
2.14.02.2.01.0023- Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	6 Laporan	82.874.436,00	7 Laporan	95.305.601,00	8 Laporan	107.695.329,00	9 Laporan	117.387.909,00	10 Laporan	129.126.700,00
2.14.02.2.01.0025- Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	88.054.088,00	1 dokumen	101.262.201,00	1 dokumen	114.426.287,00	1 dokumen	124.724.653,00	1 dokumen	137.197.118,00
2.14.02.2.01.0027- Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	4 satuan pendidikan	5 satuan pendidikan	82.874.436,00	6 satuan pendidikan	95.305.601,00	7 satuan pendidikan	107.695.329,00	8 satuan pendidikan	117.387.909,00	6 satuan pendidikan	129.126.700,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.02.2.01.0028-Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	5 laporan	10 laporan	82.874.436,00	10 laporan	95.305.601,00	10 laporan	107.695.329,00	10 laporan	117.387.909,00	10 laporan	129.126.700,00
2.14.02.2.01.0029-Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	88.054.088,00	1 Kabupaten/Kota	101.262.201,00	1 Kabupaten/Kota	114.426.287,00	1 Kabupaten/Kota	124.724.653,00	1 Kabupaten/Kota	137.197.118,00
2.14.02.2.01.0030-Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	5 laporan	10 laporan	82.874.436,00	10 laporan	95.305.601,00	10 laporan	107.695.329,00	10 laporan	117.387.909,00	10 laporan	129.126.700,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.02.2.01.0031- Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	88.054.088,00	1 dokumen	101.262.201,00	1 dokumen	114.426.287,00	1 dokumen	124.724.653,00	1 dokumen	137.197.118,00
2.14.02.2.01.0032- Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	103.593.045,00	1 dokumen	119.132.001,00	1 dokumen	134.619.162,00	1 dokumen	146.734.886,00	1 dokumen	161.408.375,00
2.14.02.2.01.0033- Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	82.874.436,00	1 dokumen	95.305.601,00	1 dokumen	107.695.329,00	1 dokumen	117.387.909,00	1 dokumen	129.126.700,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.02.2.01.0034- Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukuranya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukuranya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	77.694.784,00	1 Perangkat Daerah	89.349.001,00	1 Perangkat Daerah	100.964.371,00	1 Perangkat Daerah	110.051.165,00	1 Perangkat Daerah	121.056.281,00
2.14.02.2.02- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Data Kependudukan yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan Kampung KB	5 unit	6 unit	847.579.456,00	7 unit	974.716.375,00	7 unit	1.101.429.504,00	8 unit	1.200.558.159,00	8 unit	1.320.613.975,00
2.14.02.2.02.0009- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	5 laporan	6 laporan	67.806.358,00	6 laporan	77.977.309,00	7 laporan	88.114.363,00	7 laporan	96.044.650,00	8 laporan	105.649.117,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.02.2.02.0010- Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	5 dokumen	6 dokumen	59.330.562,00	7 dokumen	68.230.146,00	8 dokumen	77.100.065,00	9 dokumen	84.039.071,00	10 dokumen	92.442.978,00
2.14.02.2.02.0011- Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	19 dokumen	19 dokumen	72.044.254,00	19 dokumen	82.850.892,00	19 dokumen	93.621.508,00	19 dokumen	102.047.444,00	19 dokumen	112.252.188,00
2.14.02.2.02.0012- Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	5 laporan	6 laporan	72.044.254,00	7 Laporan	82.850.892,00	8 Laporan	93.621.508,00	9 laporan	102.047.444,00	10 laporan	112.252.188,00
2.14.02.2.02.0013- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	1 dokumen	50.854.767,00	1 dokumen	58.482.983,00	1 dokumen	66.085.770,00	1 dokumen	72.033.490,00	1 dokumen	79.236.839,00
2.14.02.2.02.0016- Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	1 dokumen	1 dokumen	59.330.562,00	1 dokumen	68.230.146,00	1 dokumen	77.100.065,00	1 dokumen	84.039.071,00	1 dokumen	92.442.978,00
2.14.02.2.02.0018- Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	5 laporan	6 laporan	59.330.562,00	6 laporan	68.230.146,00	7 laporan	77.100.065,00	7 laporan	84.039.071,00	8 laporan	92.442.978,00
2.14.02.2.02.0022- Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	67.806.356,00	1 dokumen	77.977.310,00	1 dokumen	88.114.360,00	1 dokumen	96.044.653,00	1 dokumen	105.649.118,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.02.2.02.0023- Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	1 dokumen	1 dokumen	59.330.562,00	1 dokumen	68.230.146,00	1 dokumen	77.100.065,00	1 dokumen	84.039.071,00	1 dokumen	92.442.978,00
2.14.02.2.02.0024- Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	50.854.767,00	1 dokumen	58.482.983,00	1 dokumen	66.085.770,00	1 dokumen	72.033.490,00	1 dokumen	79.236.839,00
2.14.02.2.02.0025- Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 dokumen	1 dokumen	50.854.767,00	1 dokumen	58.482.983,00	1 dokumen	66.085.770,00	1 dokumen	72.033.490,00	1 dokumen	79.236.839,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.02.2.02.0026- Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	5 unit	6 unit	50.854.767,00	7 unit	58.482.983,00	8 unit	66.085.770,00	9 unit	72.033.490,00	10 unit	79.236.839,00
2.14.02.2.02.0027- Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	1 dokumen	59.330.562,00	1 dokumen	68.230.146,00	1 dokumen	77.100.065,00	1 dokumen	84.039.071,00	1 dokumen	92.442.978,00
2.14.02.2.02.0028- Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 dokumen	1 dokumen	67.806.356,00	1 dokumen	77.977.310,00	1 dokumen	88.114.360,00	1 dokumen	96.044.653,00	1 dokumen	105.649.118,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.03- PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	59,2%	61,9%	1.151.033.830,00	62%	1.323.688.904,00	62,1%	1.495.768.462,00	62,2%	1.630.387.623,00	62,2%	1.793.426.386,00
	2. Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	9,6%	10%		9,5%		9%		8,5%		8,5%	
	3. Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	11,2%	11%		10,8%		10,6%		10,4%		10,4%	
2.14.03.2.01- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang mendukung program Bangga Kencana	14 Kecamatan	19 Kecamatan	310.779.134,00	19 Kecamatan	357.396.004,00	19 Kecamatan	403.857.485,00	19 Kecamatan	440.204.658,00	19 Kecamatan	484.225.124,00
2.14.03.2.01.0008- Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	5 laporan	6 laporan	46.616.870,00	7 laporan	53.609.399,00	8 laporan	60.578.623,00	9 laporan	66.030.698,00	10 laporan	72.633.769,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.03.2.01.0009- Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	19 unit	19 unit	62.155.827,00	19 unit	71.479.201,00	19 unit	80.771.497,00	19 unit	88.040.932,00	19 unit	96.845.025,00
2.14.03.2.01.0010- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	19 laporan	19 laporan	34.185.705,00	19 laporan	39.313.560,00	19 laporan	44.424.323,00	19 laporan	48.422.512,00	19 laporan	53.264.764,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.03.2.01.0011- Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	19 laporan	19 laporan	43.509.079,00	19 laporan	50.035.441,00	19 laporan	56.540.048,00	19 laporan	61.628.652,00	19 laporan	67.791.517,00
2.14.03.2.01.0012- Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	19 dokumen	19 dokumen	43.509.079,00	19 dokumen	50.035.441,00	19 dokumen	56.540.048,00	19 dokumen	61.628.652,00	19 dokumen	67.791.517,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.03.2.01.0013- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	5 dokumen	6 dokumen	40.401.287,00	7 dokumen	46.461.481,00	8 dokumen	52.501.473,00	9 dokumen	57.226.606,00	10 dokumen	62.949.266,00
2.14.03.2.01.0014- Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 organisasi	10 organisasi	40.401.287,00	10 organisasi	46.461.481,00	10 organisasi	52.501.473,00	10 organisasi	57.226.606,00	10 organisasi	62.949.266,00
2.14.03.2.02- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB yang berkinerja baik	25 orang	27 orang	345.310.149,00	28 orang	397.106.671,00	29 orang	448.730.539,00	30 orang	489.116.287,00	31 orang	538.027.916,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.03.2.02.0002- Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	19 unit	19 unit	93.233.741,00	19 unit	107.218.801,00	19 unit	121.157.245,00	19 unit	132.061.397,00	19 unit	145.267.537,00
2.14.03.2.02.0004- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	200 orang	200 orang	86.327.537,00	220 orang	99.276.668,00	242 orang	112.182.635,00	266 orang	122.279.072,00	293 orang	134.506.979,00
2.14.03.2.02.0005- Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	193 organisasi	193 organisasi	86.327.537,00	195 organisasi	99.276.668,00	195 organisasi	112.182.635,00	195 organisasi	122.279.072,00	195 organisasi	134.506.979,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.03.2.02.0007- Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyul uh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyu luh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	19 laporan	19 laporan	79.421.334,00	19 laporan	91.334.534,00	19 laporan	103.208.024,00	19 laporan	112.496.746,00	19 laporan	123.746.421,00
2.14.03.2.03- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Alat dan Obat Kontrasepsi MKJP Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	100%	100%	264.737.781,00	100%	304.448.448,00	100%	344.026.746,00	100%	374.989.153,00	100%	412.488.069,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.03.2.03.0001- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	54 Laporan	54 Laporan	19.855.331,00	54 Laporan	22.833.630,00	54 Laporan	25.802.005,00	54 Laporan	28.124.191,00	54 Laporan	30.936.606,00
2.14.03.2.03.0003- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1153 orang	1392 orang	19.855.334,00	1531 orang	22.833.634,00	1684 orang	25.802.006,00	1852 orang	28.124.186,00	2037 orang	30.936.605,00
2.14.03.2.03.0004- Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5 Laporan	5 Laporan	19.855.334,00	5 Laporan	22.833.634,00	5 Laporan	25.802.006,00	5 Laporan	28.124.186,00	5 Laporan	30.936.605,00
2.14.03.2.03.0005- Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Dokumen	19 Dokumen	19.855.334,00	19 Dokumen	22.833.634,00	19 Dokumen	25.802.006,00	19 Dokumen	28.124.186,00	19 Dokumen	30.936.605,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.03.2.03.0006- Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	19 Unit	21.179.022,00	19 Unit	24.355.876,00	19 Unit	27.522.140,00	19 Unit	29.999.132,00	19 Unit	32.999.046,00
2.14.03.2.03.0007- Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	570 orang	760 orang	19.855.334,00	855 orang	22.833.634,00	950 orang	25.802.006,00	1045 orang	28.124.186,00	1140 orang	30.936.605,00
2.14.03.2.03.0008- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	19 Laporan	19 Laporan	19.855.334,00	19 Laporan	22.833.634,00	19 Laporan	25.802.006,00	19 Laporan	28.124.186,00	19 Laporan	30.936.605,00
2.14.03.2.03.0010- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	54 orang	54 orang	23.826.400,00	54 orang	27.400.360,00	54 orang	30.962.407,00	54 orang	33.749.024,00	54 orang	37.123.926,00
2.14.03.2.03.0011- Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	1 Laporan	21.179.022,00	1 Laporan	24.355.876,00	1 Laporan	27.522.140,00	1 Laporan	29.999.132,00	1 Laporan	32.999.046,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.03.2.03.0013- Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	10 orang	10 orang	19.855.334,00	10 orang	22.833.634,00	10 orang	25.802.006,00	10 orang	28.124.186,00	10 orang	30.936.605,00
2.14.03.2.03.0015- Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 orang	2 orang	19.855.334,00	2 orang	22.833.634,00	2 orang	25.802.006,00	2 orang	28.124.186,00	2 orang	30.936.605,00
2.14.03.2.03.0016- Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	95 orang	285 orang	19.855.334,00	285 orang	22.833.634,00	380 orang	25.802.006,00	380 orang	28.124.186,00	475 orang	30.936.605,00
2.14.03.2.03.0017- Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	19 Kegiatan	38 kegiatan	19.855.334,00	38 kegiatan	22.833.634,00	57 kegiatan	25.802.006,00	57 kegiatan	28.124.186,00	76 kegiatan	30.936.605,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.03.2.04- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase peserta KB baru	18,79%	21,77%	230.206.766,00	21,77%	264.737.781,00	21,77%	299.153.692,00	21,77%	326.077.525,00	21,77%	358.685.277,00
2.14.03.2.04.0005- Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	34 unit	195 unit	103.593.044,00	195 unit	119.132.002,00	195 unit	134.619.161,00	195 unit	146.734.886,00	195 unit	161.408.375,00
2.14.03.2.04.0006- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	34 kampung	195 kampung	69.062.030,00	195 kampung	79.421.334,00	195 kampung	89.746.108,00	195 kampung	97.823.258,00	195 kampung	107.605.583,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.03.2.04.0007- Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	34 Dokumen	34 Dokumen	57.551.692,00	34 Dokumen	66.184.445,00	34 Dokumen	74.788.423,00	34 Dokumen	81.519.381,00	34 Dokumen	89.671.319,00
2.14.04- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1. Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	76%	76%	3.370.926.996,00	78%	4.080.938.123,00	80%	4.693.078.842,00	82%	5.303.179.091,00	84%	5.780.465.209,00
	2. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	81,6	82,7		83,6		84,9		86,0		87,1	
	3. Indeks Lansia Berdaya	55,3	56,6		58,0		59,3		60,8		62,2	
	4. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	20,3%	21,4%		22,6%		23,9%		25,2%		26,6%	
	5. Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	83,90%	90%		90%		90%		90%		90%	
	6. Kelompok sasaran yang memperoleh	93,91%	90%		90%		90%		90%		90%	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	pendampingan oleh TPK											
2.14.04.2.01- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL. UPPKS, PIK R) yang di bina	33,07%	57,6%	530.521.956,00	57,6%	610.100.249,00	76,9%	689.413.281,00	76,9%	751.460.478,00	96,15%	826.606.525,00
2.14.04.2.01.0014- Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	15 Keluarga	24 Keluarga	34.483.928,00	30 Keluarga	39.656.520,00	36 Keluarga	44.811.861,00	42 Keluarga	48.844.934,00	48 Keluarga	53.729.421,00
2.14.04.2.01.0015- Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	19 Kegiatan	19 Kegiatan	34.483.927,00	19 Kegiatan	39.656.516,00	19 Kegiatan	44.811.863,00	19 Kegiatan	48.844.931,00	19 Kegiatan	53.729.424,00
2.14.04.2.01.0016- Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3 Laporan / Dokumen	19 Laporan / Dokumen	37.136.537,00	19 Laporan / Dokumen	42.707.017,00	19 Laporan / Dokumen	48.258.930,00	19 Laporan / Dokumen	52.602.233,00	19 Laporan / Dokumen	57.862.457,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.04.2.01.0017- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	195 Laporan	195 Laporan	37.136.537,00	195 Laporan	42.707.017,00	195 Laporan	48.258.930,00	195 Laporan	52.602.233,00	195 Laporan	57.862.457,00
2.14.04.2.01.0018- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	19 unit	19 unit	37.136.537,00	19 unit	42.707.017,00	19 unit	48.258.930,00	19 unit	52.602.233,00	19 unit	57.862.457,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.04.2.01.0019- Orientasi/Pelatiha n Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatiha n Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	416 orang	416 orang	37.136.537,00	1248 orang	42.707.017,00	1248 orang	48.258.930,00	1248 orang	52.602.233,00	1248 orang	57.862.457,00
2.14.04.2.01.0020- Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	190 orang	380 orang	34.483.927,00	380 orang	39.656.516,00	380 orang	44.811.863,00	570 orang	48.844.931,00	570 orang	53.729.424,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.04.2.01.0021- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	19 Laporan	19 Laporan	37.136.537,00	19 Laporan	42.707.017,00	19 Laporan	48.258.930,00	19 Laporan	52.602.233,00	19 Laporan	57.862.457,00
2.14.04.2.01.0023- Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	19 Dokumen	19 Dokumen	34.483.927,00	19 Dokumen	39.656.516,00	19 Dokumen	44.811.863,00	19 Dokumen	48.844.931,00	19 Dokumen	53.729.424,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.04.2.01.0024- Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1248 orang	1248 orang	37.136.537,00	1248 orang	42.707.017,00	1248 orang	48.258.930,00	1248 orang	52.602.233,00	1248 orang	57.862.457,00
2.14.04.2.01.0025- Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	19 Laporan	19 Laporan	31.831.317,00	19 Laporan	36.606.015,00	19 Laporan	41.364.797,00	19 Laporan	45.087.629,00	19 Laporan	49.596.392,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.04.2.01.0026- Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	82 kelompok	90 kelompok	37.136.537,00	99 kelompok	42.707.017,00	109 kelompok	48.258.930,00	120 kelompok	52.602.233,00	132 kelompok	57.862.457,00
2.14.04.2.01.0027- Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	1 Dokumen	31.831.317,00	1 Dokumen	36.606.015,00	1 Dokumen	41.364.797,00	1 Dokumen	45.087.629,00	1 Dokumen	49.596.392,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.04.2.01.0028- Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	82 kelompok	90 kelompok	37.136.537,00	99 kelompok	42.707.017,00	109 kelompok	48.258.930,00	120 kelompok	52.602.233,00	132 kelompok	57.862.457,00
2.14.04.2.01.0029- Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	2 Laporan	2 Laporan	31.831.317,00	2 Laporan	36.606.015,00	2 Laporan	41.364.797,00	2 Laporan	45.087.629,00	2 Laporan	49.596.392,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.04.2.02- Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan PUS peserta KB Kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R)	87,66%	88,53%	3.550.416.167,00	88,53%	4.082.978.593,00	89,41%	4.613.765.810,00	90,28%	5.029.004.731,00	90,28%	5.531.905.205,00
2.14.04.2.02.0005- Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	416 Laporan	416 Laporan	1.565.039.771,00	416 Laporan	1.799.795.737,00	416 Laporan	2.033.769.182,00	416 Laporan	2.216.808.407,00	416 Laporan	2.438.489.249,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCAME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.14.04.2.02.0006- Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	416 Laporan	416 Laporan	1.598.911.556,00	416 Laporan	1.838.748.290,00	416 Laporan	2.077.785.568,00	416 Laporan	2.264.786.269,00	416 Laporan	2.491.264.896,00
2.14.04.2.02.0007- Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	6 Laporan	6 Laporan	210.168.313,00	6 Laporan	241.693.560,00	6 Laporan	273.113.723,00	6 Laporan	297.693.958,00	6 Laporan	327.463.354,00
2.14.04.2.02.0008- Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	19 Laporan	19 Laporan	176.296.527,00	19 Laporan	202.741.006,00	19 Laporan	229.097.337,00	19 Laporan	249.716.097,00	19 Laporan	274.687.706,00
Total Keseluruhan				14.648.160.343,38		16.845.384.397,06		19.035.284.366,69		20.748.459.960,24		22.823.305.956,77

Tabel IV.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan

NO	PROGRAM	OUOUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2.08.02- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	2.08.02.2.01.0011- Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02.0009- Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	2.08.07- Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	2.08.07.2.01.0007- Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0013- Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
3	2.14.03- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.14.03.2.03.0008- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	
			2.14.03.2.04.0005- Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
4	2.14.04- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	2.14.04.2.01.0016- Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	

NO	PROGRAM	OUOUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
	Keluarga Sejahtera (KS)		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	

Tabel IV.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	INDIKATOR KINERJA UTAMA								
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	56,29	88,39	89,29	90,19	91,09	92,34	92,34
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,487	0,414	0,409	0,404	0,399	0,394	0,394
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	na	56,3	61,05	65,8	70,55	75,29	75,29
4	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	na	65,95	66,11	66,27	66,43	66,59	66,75
5	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)	Poin	na	300	350	400	450	500	550
6	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Poin	404,3	600	625	650	675	700	725
7	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	na	57,81	59,81	61,81	63,81	65,81	67,81

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	55,85	59,24	62,16	65,07	67,99	70,9	73,82

Tabel IV.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
I.A.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	na	4	5	6	7	8	9
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	59,91	73,03	73,28	73,53	73,78	74,03	74,28
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	na	5	10	15	20	25	25
5	Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan puspaga	Keluarga	na	100	110	120	130	140	150
6	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	na	50	55	60	65	70	75
7	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	56,07	58,06	61,76	65,46	69,16	72,91	72,91
8	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
10	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	na	62,29	68,29	74,29	80,29	86,44	86,44
I.B.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,44	2,44	2,33	2,22	2,11	2	1,89
12	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	32,3	32,3	28,68	25,05	21,43	17,8	14,18
13	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Demand Satisfied)	%	na	85,2	85,8	86,4	87	87,7	87,7
14	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	59,2	61,8	61,9	62	62,1	62,2	62,2
15	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,6	10,5	10	9,5	9	8,5	8
16	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	11,2	11,2	11	10,8	10,6	10,4	10,2
17	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	76	76	78	80	82	84	86
18	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	81,6	82,7	83,6	84,9	86	87,1	88,2
19	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	55,3	56,6	58	59,3	60,8	62,2	63,7
20	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persentase	20,3	21,4	22,6	23,9	25,2	26,6	28,1
21	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	83,90	90	90	90	90	90	90
22	Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK	Keluarga	93,91	90	90	90	90	90	90

Tabel IV.7
Defenisi Operasional dan Rumus Indikator

No	KODE- INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS	WALIDATA	TEMATIK/ TAGGING	STATUS
	1	2	3	4	5	6
I	Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	04.03.002- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}}$	PPPA, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, Sasaran RPJMD	Posistif
2	04.03.001- Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif,	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik Menghitung indeks masing – masing dimensi Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik Menghitung Indeks Kesetaraan Gender Menghitung Indeks Ketimpangan Gender	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, Sasaran RPJMD	Positif

		serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.				
3	04.03.004- Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak yang disusun sesuai dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak.;Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian perlindungan khusus anak sesuai dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak.	Penghitungan IPA dimulai dengan menghitung nilai indeks klaster menggunakan nilai indikator yang sudah dinormalisasi dengan metode nilai maksimal dan minimal. Indeks klaster tersebut dihitung dengan bobot indikator yang sama (equal weight) untuk setiap indikator dalam klaster yang sama. Kemudian, nilai IPA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klaster. Penghitungan IPA dimulai dengan menghitung nilai indeks klaster menggunakan nilai indikator yang sudah dinormalisasi dengan metode nilai maksimal dan minimal. Indeks klaster tersebut dihitung dengan bobot indikator yang sama (equal weight) untuk setiap indikator dalam klaster yang sama. Kemudian, nilai IPA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klaster. ;beda. Selanjutnya, dilakukan penghitungan IPKA dengan mengalikan tiap nilai indikator dengan bobot indikatornya. Rumus IPKA: $IPKA = (W1 * Indikator1) + ... + (Wj * Indikatorj)$ Keterangan: W1= nilai bobot indikator ke-1 Indikator1= nilai indikator ke-1 Wj= nilai bobot indikator ke-j Dj= nilai indikator ke-j	PPPA, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, Sasaran RPJMD, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)	Positif
4	03.07.010- Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal	IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.	BPS, BKKBN, Kemen-PPPA	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Sasaran RPJMD	Positif

		sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.				
5	04.03.014- Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)	Kesetaraan Gender: Penilaian terhadap kebijakan, program, dan kegiatan yang mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Pemberdayaan Perempuan: Penilaian terhadap inisiatif yang mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan. Perlindungan Anak: Penilaian terhadap kebijakan dan program yang melindungi hak-hak anak dan mendorong kesejahteraan mereka.	Hasil nilai evaluasi Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	PPPA, DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA,	Positif
6	04.03.013- Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kabupaten atau kota memenuhi standar dan kriteria sebagai lingkungan yang mendukung hak-hak anak. KLA merupakan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pelayanan yang memadai sesuai dengan hak-haknya.	Hasil nilai evaluasi Kabupaten Layak Anak	PPPA, DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA,	Positif
7	03.07.008- Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia. IPBK mencerminkan integrasi isu-isu kependudukan ke dalam lima dimensi utama yang saling terkait, yaitu:	$IPBK = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i$ Keterangan: S_i : Skor standar pada dimensi ke-i (i yang telah dinormalisasi dari berbagai indikator), n: Jumlah dimensi (biasanya 5 dimensi). IPBK bernilai antara 0 – 100, dengan interpretasi: ≥ 75 = Sangat Tinggi, 60 – 74,99 = Tinggi, 45 – 59,99 =	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA,	Positif

		Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Pembangunan Keluarga, Pendidikan dan Gender, dan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	Sedang, 30 – 44,99 = Rendah, < 30 = Sangat Rendah			
8	03.07.009- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Di luar definisi di atas dianggap sebagai keluarga khusus. Keluarga khusus, adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya, atau seorang diri (sebatang kara).	iBangga dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Selain itu, terdapat pembobotan pada indikator dalam masing-masing dimensi dengan ketentuan skor capaian indikator nasional tertinggi diberikan bobot terendah. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: dengan: : dimensi ke- ; : banyaknya dimensi; dan = 1, 2, 3. D1 : INDEKS KETENTRAMAN, dengan cara perhitungannya adalah: dengan : skor capaian dimensi ke-1 untuk indikator ke-j ; : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi ketentraman; dimana j = 1, 2, ..., 6. D2 : INDEKS KEMANDIRIAN, dengan cara perhitungannya adalah: dengan : skor capaian dimensi ke-2 untuk indikator ke-j; : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi kemandirian; dimana j= 1, 2, ..., 7. D3 : INDEKS KEBAHAGIAAN, dengan cara perhitungannya adalah: Dengan : skor capaian dimensi ke-3 untuk indikator ke-j; : bobot dimensi ke-3 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi kebahagiaan;	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, PJPk	Positif

			dimana $j = 1, 2, \dots, 4$. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh (>70), berkembang ($40-70$) atau rentan (<40).			
II	Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
II.A	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	04.03.019- Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Anggaran Responsif Gender merupakan alokasi anggaran yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender.	Jumlah ARG pada belanja operasi APBD dibagi jumlah seluruh belanja langsung APBD dikali 100%.	DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, Inmen 2	Positif
2	06.02.060- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi Jumlah angkatan kerja perempuan dikali 100%	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Inmen 2	Positif
3	04.03.028- Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif atau	1. Persentase: Ukuran yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) yang menggambarkan proporsi perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menerima layanan komprehensif dari total perempuan korban kekerasan dan TPPO	Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang diberikan layanan sesuai standar dibagi jumlah jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO dikalikan 100%	DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, Inmen 2	Positif

	Persentase Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	yang teridentifikasi. 2. Perempuan Korban Kekerasan: Perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi. 3. TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang): Tindak pidana yang melibatkan rekrutmen, transportasi, penampungan, atau penerimaan orang dengan tujuan eksploitasi melalui ancaman, penggunaan kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. 4. Layanan Komprehensif: Layanan yang mencakup berbagai aspek kebutuhan korban, seperti: Layanan Kesehatan: Penanganan medis, konseling kesehatan mental, rehabilitasi. Layanan Hukum: Bantuan hukum, pendampingan dalam proses hukum. Layanan Sosial: Penyediaan tempat tinggal sementara, pendampingan sosial, bantuan ekonomi. Layanan Psikologis: Konseling psikologis, terapi trauma. 5. Mendapatkan Layanan Komprehensif: Mengacu pada perempuan korban kekerasan dan TPPO yang telah menerima satu atau lebih layanan yang disebutkan di atas sesuai dengan kebutuhannya.				
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Suatu layanan berbasis komunitas yang memberikan edukasi, konseling, dan fasilitasi kepada keluarga (orang tua, anak, wali) dengan memperhatikan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak anak, dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan ramah anak. Mengacu pada Permen PPPA No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan	Formula konseptual: PUSPAGA Efektif = $(E + K + M + S) \times G \times H$ Keterangan: E = Edukasi keluarga tentang pengasuhan, kesehatan mental, dan komunikasi K = Konseling keluarga (ayah, ibu, anak,	DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Inmen 2	Positif

		PUSPAGA.	pasangan) • M = Materi berbasis hak anak dan kesetaraan gender • S = SDM terlatih (psikolog, konselor, fasilitator keluarga) • G = Perspektif gender → Semua aspek bebas diskriminasi peran gender • H = Perspektif hak anak → Memenuhi prinsip KHA (4 prinsip dasar)			
5	Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan puspaga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan PUSPAGA adalah banyaknya keluarga (minimal satu anggota keluarga) yang telah menerima layanan secara langsung dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam periode tertentu (biasanya per tahun). PUSPAGA merupakan layanan non-klinis yang bertujuan memperkuat ketahanan keluarga melalui edukasi, konseling, dan konsultasi dalam rangka mencegah kekerasan terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Jenis Layanan PUSPAGA yang Diakui: Layanan konsultasi/konseling (tatap muka, daring, telepon), Edukasi pengasuhan (parenting class, seminar, pelatihan), Pendampingan kasus non-klinis (misalnya konflik keluarga, pengasuhan anak, perceraian), Layanan rujukan (ke psikolog, pekerja sosial, layanan perlindungan)	$\sum_{i=1}^n K_i$ Keterangan: K_i: Keluarga ke-i yang menerima layanan PUSPAGA, Data dihimpun dari formulir atau sistem pencatatan layanan PUSPAGA, Satu keluarga dihitung satu kali, meskipun mendapatkan beberapa jenis layanan.	DP3AP2KB	RPJMD, Renstra PD	Positif
6	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak adalah ukuran sejauh mana data yang terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur anak dimanfaatkan secara nyata dalam: Perencanaan	Jumlah dokumen/kebijakan menggunakan data gender dan anak dibagi jumlah total dokumen/kebijakan yang dianalisis dikali 100%	DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Inmen 2	Positif

	Penyusunan Kebijakan	program/kegiatan, Evaluasi kebijakan, dan Penyusunan kebijakan dan anggaran. Indikator ini digunakan untuk menilai implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan keberpihakan terhadap isu anak dalam pembangunan. Pemanfaatan yang dimaksud mencakup: Penggunaan data terpilah dalam dokumen perencanaan (Renstra, RKPD, RKA, DPA, dsb), Analisis gender dalam penyusunan kebijakan/program, dan Kebijakan/program yang responsif gender dan ramah anak				
7	04.03.003- Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemenuhan hak anak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.	Penghitungan IPHA dimulai dengan menghitung nilai indeks klaster menggunakan nilai indikator yang sudah dinormalisasi dengan metode nilai maksimal dan minimal. Indeks klaster tersebut dihitung dengan bobot indikator yang sama (equal weight) untuk setiap indikator dalam klaster yang sama. Kemudian, nilai IPHA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klaster. - Nilai indeks klaster IPHA Indeks $K_j = ((\sum_{i=1}^n [SX]_{ji}) / n_j) \times 100$ Keterangan: Indeks Kj : nilai indeks klaster ke-j SXji : nilai indikator ke-i pada klaster ke-j yang telah dinormalisasi Nj : banyaknya indikator pada klaster ke-j – Nilai IPHA Indeks= (W1 * Indeks D1) + ... + (Wj * Indeks Dj) Keterangan: W1= nilai bobot klaster ke-1 D1= nilai indeks klaster ke-1 Wj= nilai bobot klaster ke-j Dj= nilai indeks klaster ke-j	PPPA, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Inmen 2	Positif
8	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Anak memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan dibagi Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus dikalikan 100%	DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Inmen 2	Positif

		korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Layanan Konprehensif adalah sistem layanan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.				
9	04.03.016- Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase anak usia 0-17 tahun korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif adalah perbandingan anak korban kekerasan berdasarkan data layanan SAPA Anak dan Simfoni PPA yang dibandingkan anak usia 0-17 tahun korban kekerasan. Layanan Komprehensif pada layanan SAPA Anak adalah layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan anak secara menyeluruh, berkualitas dan tuntas dengan pendekatan manajemen kasus secara tepat melalui assesmen oleh tenaga profesional, dimana layanan yang diperoleh lebih dari 2 layanan dan sudah diterminasi di pusat dan korban yang mendapatkan layanan merupakan kewenangan pusat/korban yang ditangani oleh pusat. Sehingga, persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapatkan layanan komprehensif diperoleh dari jumlah korban yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi	Rumus perhitungan: % anak korban yang mendapatkan layanan komprehensif= $a/A \times 100\%$. Keterangan: a = Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif di tahun berjalan berdasarkan data SAPA Anak dan SIMFONI PPA A= Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani Kementerian PPPA dan lembaga layanan PPA di daerah secara keseluruhan di tahun berjalan, baik yang sudah mendapatkan layanan secara tuntas maupun yang belum tuntas	DP3PA2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA,	Positif

		dengan jumlah korban kewenangan pusat. Sementara, berdasarkan data SIMFONI PPA, korban yang mendapatkan layanan komprehensif adalah korban kekerasan yang mendapatkan layanan >=2 layanan. Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapatkan layanan komprehensif diperoleh dari jumlah korban yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi dengan jumlah korban kekerasan.				
10	04.03.005- Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.	Penghitungan IPKA dimulai dengan penentuan bobot indikator. Setiap indikator dapat memiliki bobot yang berbeda. Selanjutnya, dilakukan penghitungan IPKA dengan mengalikan tiap nilai indikator dengan bobot indikatornya. Rumus IPKA: IPKA = (W1 * Indikator1) + ... + (Wj * Indikatorj) Keterangan: W1= nilai bobot indikator ke-1 Indikator1= nilai indikator ke-1 Wj= nilai bobot indikator ke-j Dj= nilai indikator ke-j	PPPA, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Inmen 2	Positif
II.B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
11	03.07.002- TFR (Angka Kelahiran Total) atau Angka Fertilitas Total/ Total Fertility Rate (TFR)	Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (15-49 tahun).	Metode penghitungan TFR sama dengan metode penghitungan ASFR yaitu menggunakan metode tidak langsung dengan metode anak kandung/own children method (OCM). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan Wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan formula sebagai berikut: $TFR = \frac{1}{1000} \times \left[5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i \right]$	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, PJPK, Inmen 2	Positif

			$ASFR_{it} = \frac{Bi}{Pi} \times 100$ dengan: : jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur ; : jumlah wanita kelompok umur ; dan : kelompok umur terdiri dari 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, dan 45-49 tahun.			
12	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 Wanita pada kelompok umur 15-19 tahun. Kelahiran hidup pada wanita berumur antara 15 sampai dengan 19 tahun Atau	Penghitungan ASFR 15-19 tahun menggunakan metode tidak langsung dengan metode anak kandung/own children method (OCM). Metode anak kandung (own children method/OCM) menggunakan Teknik reverse-survival, yaitu suatu cara mengukur fertilitas beberapa tahun ke belakang sebelum sensus atau survei (dilihat dari asosiasi usia tunggal anak kandung dengan usia tunggal ibu kandungnya). Jumlah kelahiran dan jumlah wanita menurut usia tunggal yang diperoleh dari metode reverse-survival menggunakan tingkat survival rasio dari life table yang level mortalitasnya diperoleh dari pengolahan data Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga. Penghitungan ASFR yang dihasilkan dari metode anak kandung ini dapat juga digunakan untuk melihat pola fertilitas. Hal ini dimungkinkan karena metode ini menghasilkan estimasi fertilitas 15 tahun ke belakang dengan menggunakan data usia tunggal anak 0-14 tahun dan usia ibu 15-65 tahun. Untuk memudahkan dan mengurangi human error, proses penghitungan indikator ini menggunakan mini software FERT yang dikembangkan oleh East-West Population Center. Software ini telah diimplementasikan selama ini oleh BPS dalam penghitungan metode anak kandung. Penghitungan ASFR 15-19 tahun, yaitu membagi	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, PJPk, Inmen 2	Positif

			jumlah kelahiran kelompok usia 15-19 tahun dengan jumlah wanita pada kelompok usia yang sama dikali 1.000. ASFR 15-19 tahun dinyatakan dalam jumlah kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia 15-19 tahun, dengan formula sebagai berikut: Dengan B15-19 : jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur 15-19 tahun dan P15-19 : jumlah wanita kelompok umur 15-19 tahun.			
13	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Demand Satisfied)	Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern. Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah prevalensi penggunaan kontrasepsi (suatu cara dan cara modern) dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB). Ukuran untuk melihat seberapa besar dari total pasangan atau perempuan usia subur yang membutuhkan kontrasepsi serta benar-benar menggunakan alat atau metode KB.	Tahap Pertama: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi, baik metode kontrasepsi modern maupun tradisional (Prevalensi Kontrasepsi atau CPR). Tahap Kedua: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern (Prevalensi Kontrasepsi Modern atau mCPR). Tahap Ketiga: Menghitung PUS yang kebutuhan ber-KBnya tidak terpenuhi (unmet need KB) Tahap Keempat: Berdasarkan tiga tahap di atas, selanjutnya dapat dihitung proporsi kebutuhan KB menurut metode kontrasepsi modern yang terpenuhi dengan formula sebagai berikut: Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB Modern adalah proporsi kebutuhan KB PUS yang telah terpenuhi penggunaan alat/obat kontrasepsi Modern meliputi IUD, Implant, MOW, MOP, Pil, Suntik, Kondom dan MAL. Berdasarkan Buku Laporan SDKI Tahun 2017 formulasi untuk menghitung Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB Modern sebagai berikut:	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, PJPk, Inmen 2	Positif
14	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) adalah proporsi wanita usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu,	Jumlah peserta KB aktif modern dibagi jumlah pasangan usia subur dikalikan 100%	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Inmen 2	Positif

		dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini mengukur prevalensi penggunaan metode kontrasepsi modern dalam suatu populasi, yang mencakup semua metode kontrasepsi yang dianggap modern, seperti pil kontrasepsi, alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), kondom, dan metode lainnya.				
15	03.07.019. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB) meliputi 1)perempuan yang tidak sedang hamil atau tidak sedang amenore postpartum, dalam keadaan subur, dan ingin menunda kehamilan dalam waktu 2 tahun yang akan datang atau tidak ingin anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat/cara KB; 2)sedang hamil tetapi kehamilannya tidak tepat waktu atau tidak diinginkan, dan 3)sedang amenore postpartum tetapi kehamilannya yang terjadi dalam 2 tahun terakhir tidak tepat waktu atau tidak diinginkan	Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda anak (spacing)v tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi dibagi jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang sama dan dinyatakan dalam satuan (%) Unmet Need KBi = $(JPUR_{unmet\ need} / JPUR_i) \times 100\%$ Keterangan : Unmet need KBi : Persentase perempuan usia reproduksi pada kelompok i yang kebutuhan keluarga berencana tidak terpenuhi JPUR _{unmet need} : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi JPUR _i : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang sama	BKKBN, BPS, DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Inmen 2, Stunting	Negatif
16	03.07.020- Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Perbandingan jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti terhadap jumlah ibu yang saat ini sedang hamil	Jumlah kehamilan yang tidak direncanakan dibagi jumlah ibu hamil dikali 100%	BKKBN, BPS, DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, Stunting	Positif
17	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga adalah ukuran proporsi jumlah keluarga yang secara aktif berpartisipasi dalam kelompok-kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Kelompok kegiatan ketahanan	Jumlah keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan dibagi jumlah seluruh keluarga yang menjadi sasaran dikali 100%	BKKBN, BPS, DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Inmen 2	Positif

		keluarga ini bisa meliputi: Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS), Kelompok Kegiatan Poktan lainnya yang berhubungan dengan program ketahanan keluarga. Kriteria partisipasi aktif dapat mencakup: Kehadiran rutin dalam pertemuan/aktivitas, Keterlibatan dalam pelatihan atau penyuluhan, dan Kontribusi dalam kegiatan kelompok				
18	03.07.014- Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orang tua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja. Pengasuhan keluarga pada remaja, di mana remaja adalah anggota keluarga usia 10 - 24 tahun dan belum menikah.	"Indeks pengasuhan remaja dihitung dengan pendekatan agregat indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: dengan : indikator ke- ; dan : bobot ke- ; di mana . Adapun bobot untuk masing-masing indikator adalah , dengan = banyaknya indikator. V1 : memiliki legalitas diri, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki akta lahir. V2 : akses terhadap pendidikan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah. V3 : terbebas dari pekerjaan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-14 tahun) tidak/belum bekerja. V4 : memiliki jaminan kesehatan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, PJPK	Positif

			remaja (10-24 tahun) memiliki asuransi kesehatan (pemerintah/swasta). V5: memiliki jaminan masa depan, adalah persentase keluarga punya remaja yang memiliki aset: tabungan (uang kontan/rekening aktif), emas/perhiasan (minimal 10 gram), dan atau hewan ternak yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan. V6 : kecukupan gizi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari. V7 : kondisi sehat, adalah persentase keluarga punya remaja di mana tidak ada anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis dan atau disabilitas. V8 : akses terhadap sumber informasi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet)."			
19	Indeks Lansia Berdaya	Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan	"Indeks Lansia Berdaya dihitung berdasarkan 7 Dimensi Lansia Tangguh dengan variabel sebagai berikut. - Dimensi Spiritual: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut; - Dimensi Fisik: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari; - Dimensi Emosional: a. Tanpa tegur sapa (selama 3 hari berturut-turut); b. Pisah ranjang antara suami dan istri (selama 7 hari berturut-turut); c. Pergi dari rumah/minggat (selama 2 hari berturut-	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, PJPk	Positif

		turut); d. Kekerasan dalam rumah tangga - Dimensi Sosial Kemasyarakatan: Keluarga yang memiliki lansia dan atau lansia (umur ≥ 60 tahun) ikut kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL); - Dimensi Intelektual: Minimal paling sedikit ada 1 (satu) lansia dengan pendidikan minimal SLTP; - Dimensi Vokasional: Minimal paling sedikit ada 1 (satu) lansia dengan status pekerjaan adalah bekerja; - Dimensi Lingkungan: Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT. - Rumus : D_i : dimensi ke- i, dan w_i : bobot ke- i; dimana $i = 1, 2, \dots, 7$. Adapun bobot untuk masing-masing dimensi adalah $w_1 = 0,1$; $w_2 = 0,1$; $w_3 = 0,2$; $w_4 = 0,1$; $w_5 = 0,25$; $w_6 = 0,15$; dan $w_7 = 0,1$. D_1 : dimensi spiritual (Sp), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang setiap anggota keluarga usia 10 tahun ke atas menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut. D_2 : dimensi intelektual (In), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia dimana terdapat paling sedikit 1 (satu) lansia yang pendidikan terakhir minimal SLTP. D_3 : dimensi fisik (Fs), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang setiap anggota keluarganya makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari. D_4 : dimensi emosional (Es), adalah persentase			
--	--	--	--	--	--

			keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang tidak terdapat konflik diantara anggota keluarga (tanpa tegur sapa, pisah ranjang antara suami dan istri, pergi dari rumah/minggat, serta kekerasan dalam rumah tangga). <i>D5</i> : dimensi sosial kemasyarakatan (SK), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang memiliki lansia dan atau lansia(, adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang memiliki lansia dan atau lansia (umur $\geq$ 60 tahun) ikut kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) <i>D6</i> : dimensi vokasional (PV), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia dimana terdapat paling sedikit 1 (satu) lansia yang bekerja. <i>D7</i> : dimensi lingkungan (Lk), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT. Indeks Lansia Tangguh dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang berbeda. Indeks Lansia Tangguh bernilai 0-100, dengan arti semakin tinggi nilainya berarti semakin baik/tangguh lansianya."			
20	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat	Perhitungan persentase Kampung Keluarga Mandiri, yaitu jumlah desa/kelurahan yang memiliki Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri dibagi dengan jumlah desa/kelurahan. Indikator ini dinyatakan dalam satuan persen (%).	BKKBN, BPS, DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, PJPk	
21	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan	Pasangan Calon Pengantin (Catin) yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting		DP3AP2KB, BKKBN, Kemenag	RPJMN, RPJMD, Renstra PD,	

	bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting atau 03.07.017- Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan	adalah pasangan pria dan wanita yang telah mendaftarkan pernikahannya dan mengikuti sesi bimbingan yang diselenggarakan oleh lembaga terkait (seperti KUA, Puskesmas, Dinas P3A, atau BKKBN), dengan materi yang mencakup: Kesehatan reproduksi, Perencanaan keluarga dan jarak kehamilan, Gizi calon ibu & ayah, Pencegahan anemia, Pentingnya pemeriksaan kesehatan pra-nikah, Peran keluarga dalam pencegahan stunting. Bimbingan ini umumnya diberikan melalui program seperti Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dari BKKBN atau Bimbingan Perkawinan bagi Catin dari Kemenag..	$\sum_{i=1}^n P_i$ Keterangan: P_i : Pasangan calon pengantin ke-i yang telah mengikuti bimbingan yang memuat materi pencegahan stunting. Catin hanya dihitung satu kali.		Stunting	
22	03.07.018- Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK mencakup (Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah dan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Konsep: Calon pengantin mendapatkan pendampingan oleh TPK. Definisi: Calon pengantin yang teregister di Aplikasi Elsimil yang mendapatkan pendampingan edukasi, baik yang dilakukan secara perorangan dan kelompok oleh tim pendamping keluarga dibandingkan dengan calon pengantin yang teregister di SIMKAH.	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan pendampingan edukasi pra nikah, baik perorangan maupun kelompok dibagi calon pengantin dikali 100%.	DP3AP2KB, BKKBN, Kemenag	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Stunting	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kerangka mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Sambas yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan pusat. yang telah ditetapkan untuk mencapai target tujuan pembangunan nasional di Kabupaten Sambas.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sambas. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan

perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin ya robbal 'alamiin.

LAMPIRAN



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 394 /DP3AP2KB/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu dibentuk tim untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah diantaranya menyusun agenda kerja penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;
 - b. melakukan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
 - c. melakukan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. melakukan penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan

- f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI SAMBAS,



SATONO

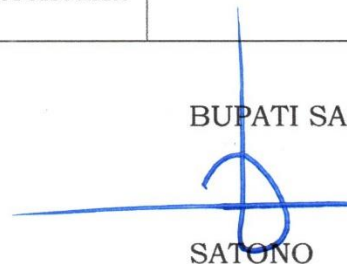
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 314 /DP3AP2KB/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBER DAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	Ketua
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	Sekretaris
3	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 2. Nur Azma, SKM/Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 3. Budiman, S.Hum/Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 4. Muhammad Zulkarnain, S.Psi/Analisis Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan
4	1. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 2. Amsar, S.K.M/Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 3. Desy Isnaini, A.Md/Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan	Kelompok Kerja Bidang Perlindungan Anak

	Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 4. Dian Eka Yani/Pengadministrasian Pengangkatan dan Pengakuan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	
5	1. Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kependudukan
6	1. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 2. Dedy Mulyono/Pengadministrasian Perkantoran Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
7	1. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan anak
8	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 3. Irwanda, SKM/Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi

BUPATI SAMBAS,



SATONO